

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN,
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERBASIS
VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen**



Oleh:

**MUHAMMAD AMIN
2019.MM.1.2236**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2021**

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN,
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERBASIS
VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen**



Oleh:

**MUHAMMAD AMIN
2019.MM.1.2236**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN,
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERBASIS
VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

Oleh:


**MUHAMMAD AMIN
2019MM12236**

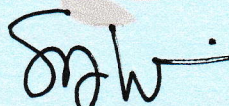
Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 19 November 2021
Dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui:
Komisi Pembimbing**

Ketua,

Anggota,



Dr. Maryadi, S.E., M.M.

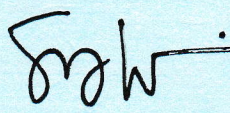

Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

Mengetahui:

Direktur PPS ITB Nobel Indonesia,

Ketua Prodi Magister Manajemen,


Dr. Maryadi, S.E., M.M.


Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

HALAMAN IDENTITAS

MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI

JUDUL TESIS:

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERBASIS *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Muhammad Amin
NIM : 2019MM12236
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Daerah

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Dr. Maryadi, S.E., M.M
Anggota : Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji I : Dr. Andi Amin Akhiruddin, S.STP., M.Si.
Dosen Penguji II : Andi Adijah S, S.Pd.M.Pd. Ph.D.
Tanggal Ujian : 19 November 2021
SK Penguji Nomor :/SK/PPS/ITB-NI/IV/2021

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER MANAJEMEN) ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang – Undang Nomor 20 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, November 2021

Mahasiswa,



Muhammad Amin
2019MM12236

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, adalah ungkapan pertama yang penulis dapat ucapkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir dan syarat guna memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana ITB Nobel Indonesia Makassar dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat”**.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah S.A.W., beserta keluarganya, para sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman.

Berkenaan dengan penulisan Tesis ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak **Dr. Maryadi, SE., MM.** selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu **Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.** selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan, petunjuk, kritik dan saran serta bersedia meluangkan waktunya selama penyusunan Tesis ini. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk bantuan dan dukungan dari banyak pihak atas selesainya penyusunan maupun penyajian Tesis ini, kepada:

1. Orang Tua tercinta Ayahanda **Abd. Muis Lese** dan Ibunda Alma. **St. Harija** yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang serta keluarga tercinta yang

senantiasa memberikan dukungan do'a, nasehat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

2. **Dr. Badaruddin, ST., M.M.** selaku Rektor ITB Nobel Indonesia Makassar.
3. **Dr. Maryadi, S.E., M.M.** selaku Direktur PPS ITB Nobel Indonesia Makassar.
4. **Dr. Sylvia Sjahrils, S.E., M.Si, AK., CA.** selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana ITB Nobel Indonesia Makassar.
5. **Dr. Muhammad Idris, S.E., M.Si.** selaku Penjaminan Mutu Prodi Magister Manajemen Program Pascasarjana ITB Nobel Indonesia Makassar.
6. **Dr. Andi Amin Akhiruddin, S.STP., M.Si.** selaku Dosen Penguji I dan **Andi Adijah S, S.Pd.M.Pd. Ph.D.** selaku Dosen penguji II dalam uji sidang tesis yang telah banyak memberikan masukan serta arahan-arahan hingga rampungnya tesis ini.
7. Istri tercinta **Andi Asisa, S.K.M,** "*I Love You So Much*" yang telah mendampingi dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi selama kuliah sampai penulisan tesis ini.
8. Bapak/Ibu Dosen dan staf yang telah mengajar dan membina mahasiswa selama proses perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana ITB Nobel Indonesia Makassar, atas kebersamaan yang dilalui bersama penuh suka cita. Dan semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis berharap Tesis ini dapat dikembangkan sebagai dasar bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam bidang penelitian manajemen. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati, menerima segala bentuk kritik maupun saran yang sifatnya membangun. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, November 2021

Penulis,

Muhammad Amin
2019MM12236

ABSTRAK

Muhammad Amin. 2021. Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dibimbing oleh Maryadi dan Sylvia Sjarlis.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang dominan pengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value For Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey dengan teknik analisis korelasional untuk mengetahui pengaruh variable terikat dan variable bebas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan studi dokumen. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Keuangan berpengaruh dominan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Pengawasan Keuangan akan semakin meningkatkan Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2) secara parsial menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Anggaran Berbasis Value For Money, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Akuntabilitas akan semakin meningkatkan Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (3) secara parsial menunjukkan bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap kinerja anggaran Berbasis Value For Money, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Transparansi Pengelolaan Keuangan akan semakin meningkatkan Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (4) secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* yang berarti bahwa peningkatan Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan akan mempengaruhi peningkatan Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 95,5%. (5) variabel Pengawasan Keuangan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for mone pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Kata kunci: Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money.



ABSTRACT

Muhammad Amin. 2021. The Effect of Financial Supervision, Accountability, and Transparency of Financial Management Based Budget Performance *Value For Money*- in the Government of West Sulawesi Province, supervised by Maryadi and Sylvia Sjarlis.

This study aims to determine and partially analyze the effect of Financial Supervision, Accountability, and Transparency of Financial Management on-based Budget Performance *Value For Money* in the Government of West Sulawesi Province. To find out and analyze the simultaneous influence of Financial Supervision, Accountability, and Transparency of Financial Management simultaneously influence the-based Budget Performance *Value For Money* in the Government of West Sulawesi Province. To find out and analyze the dominant variables that influence the Value For Money-based Budget Performance in the West Sulawesi Provincial Government.

This research is quantitative research with a survey method with a correlational analysis technique to determine the effect of a dependent variable and independent variable. Data collection methods used are questionnaires and document studies. The analytical method used is descriptive and multiple linear regression analysis.

The results show that (1) partially shows that the Financial Supervision variable has a dominant effect on Value For Money-Based Budget Performance, this indicates that the better Financial Supervision will further improve Based Budget Performance *Value For Money*- in the West Sulawesi Provincial Government. (2) partially showed that variables affect the performance of the Budget Accountability-Based Value For Money, this suggests that the better accountability will increase the Budget Performance-Based *Value For Money* to the Government of West Sulawesi province. (3) partially shows that the Financial Management Transparency variable has an effect on the performance of the Value For Money-Based budget, this indicates that the better the Financial Management Transparency will further improve the Based Budget Performance *Value For Money*- in the West Sulawesi Provincial Government. (4) simultaneously shows that the variables of Financial Supervision, Accountability, and Transparency of Financial Management affect the Performance of Based Budgets, *Value For Money*- which means that the increase in Financial Supervision, Accountability and Transparency of Financial Management will affect the increase in Budget Performance Based on *Value For Money* in the Provincial Government of West Sulawesi. by 95.5%. (5) the Financial Supervision variable is the most dominant variable affecting the performance of the value for money-based budget in the West Sulawesi Provincial Government.

Keywords: Financial Supervision, Accountability, Financial Management Transparency and Based Budget Performance Value For Money.



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN IDENTITAS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	13
2.2. Pengawasan Keuangan Daerah.....	17
2.2.1 Pengertian Pengawasan	17
2.2.2 Manfaat dan Keuntungan Pengawasan.....	18
2.2.3 Prinsip-prinsip Dalam Proses Pengawasan.....	19
2.2.4 Pengertian Keuangan Daerah.....	22
2.2.5 Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah.....	22
2.2.6 Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Daerah.....	23
2.2.7 Fungsi Pengawasan Keuangan.....	24
2.2.8 Karakteristik Pengawasan Keuangan	26
2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	29
2.3.1 Pengertian Akuntabilitas	29

2.3.2	Tujuan Akuntabilitas	31
2.3.3	Tipe-Tipe Akuntabilitas	31
2.3.4	Jenis-jenis Akuntabilitas	32
2.3.5	Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	33
2.3.6	Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.....	34
2.3.7	Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.....	36
2.3.8	Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	37
2.4.	Transparansi Pengelolaan Keuangan	39
2.4.1	Pengertian Transparansi Pengelolaan Keuangan	39
2.4.2	Karakteristik Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	40
2.5.	Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i>	42
2.5.1	Pengertian Kinerja Anggaran	42
2.5.2	Konsep <i>Value for Money</i>	44
 BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN		
3.1.	Kerangka Konseptual	49
3.2.	Hipotesis Penelitian	52
3.3.	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	53
 BAB IV. METODE PENELITIAN		
4.1.	Desain Penelitian	56
4.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	57
4.3	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian.....	57
4.4.	Instrumen Penelitian	57
4.5	Teknik Pengumpulan Data	58
4.6	Skala dan Pengukuran Data.....	58
4.7.	Teknik Analisa Data	59
 BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
5.1.	Hasil Penelitian.....	65
5.1.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	65
5.1.2	Deskripsi Data.....	73

5.1.3	Karakteristik Responden	74
5.1.4	Deskripsi Data Hasil Penelitian	79
5.1.5	Uji Kualitas Data.....	89
5.1.6	Pengujian Hipotesis.....	96
5.2	Pembahasan	103
5.2.1	Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i> pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	103
5.2.2	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i> pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	107
5.2.3	Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i> pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	111
5.2.4	Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i> pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	115
5.2.5	Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i> pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	116
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN		
6.1.	Simpulan	119
6.2.	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
5.1. Deskripsi Data Responden.....	73
5.2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74
5.3. Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Usia	75
5.4. Distribusi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	76
5.5. Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja	78
5.6. Deskripsi Responden Terhadap Pengawasan Keuangan.....	80
5.7. Deskripsi Responden Terhadap Akuntabilitas.....	82
5.8. Deskripsi Responden Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan	84
5.9. Deskripsi Responden Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i>	86
5.10. Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Keuangan (X_1)	89
5.11. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X_2)	90
5.12. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan (X_3).....	91
5.13. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i> (Y).....	92
5.14. Hasil Uji Reabilitas	93
5.15. Hasil Uji Multikolinearitas Data.....	95
5.16. Hasil Regresi Berganda	97
5.17. Hasil Uji Simultan (Uji F)	99

5.18. Hasil Uji Parsial (Uji t).....	102
5.19. Hasil Uji Beta.....	103
5.20. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2).....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1.	Kerangka Konseptual Penelitian	52
5.1	Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	72
5.2	Uji Normalitas Data	94
5.3	Hasil Uji Glejser	96

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : SURAT IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN 2 : KUESIONER PENELITIAN

LAMPIRAN 3 : TABULASI DATA

LAMPIRAN 4 : HASIL ANALISIS DATA

1. DESKRIPSI RESPONDEN
2. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF
3. UJI INSTRUMEN PENELITIAN
 - A. UJI VALIDITAS
 - B. UJI RELIABILITAS
4. UJI ASUMSI KLASIK
 - A. UJI NORMALITAS
 - B. UJI MULTIKOLINIERITAS
 - C. UJI AUTOKORELASI
 - D. UJI HETEROSKEDASTISITAS
5. UJI HIPOTESIS
 - A. UJI SIGNIFIKANSI PARSIAL (UJI T)
 - B. UJI SIGNIFIKANSI SIMULTAN (UJI F)
 - C. UJI KOEFISIEN DETERMINANSI (R^2)

LAMPIRAN 5 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan. (Mohamad Mahsun, 2012: 4)

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota atau karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga. (Mohamad Mahsun, 2012: 141)

Tingginya asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan kinerja pemerintah secara maksimal (Auditya et al., 2013). Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang

terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka kualitas pelaksanaan kerjanya harus ditingkatkan.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya. harus diakui selama ini aparatur pemerintah dalam tugasnya belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga masyarakat menuntut agar kinerja pemerintahan yang lebih baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah termasuk di pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Fenomena terkait kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang penulis kutip yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan nilai B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat nomor B/120/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021, menempatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai 63,14 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas

pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam siklus anggaran yang berjalan 1 tahun masih belum maksimal (sudah cukup baik).

Dalam penilaian 5 komponen yang dievaluasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terbilang masih rendah yakni perencanaan kerja yang bobotnya 30 hasil evaluasinya hanya bernilai 21,10, pengukuran kinerja dengan bobot 25 hasil evaluasinya hanya bernilai 12,16, pelaporan kinerja yang bobotnya 15 hasil evaluasinya bernilai 10,92, evaluasi internal dengan bobot 10 hasil evaluasinya bernilai 7,00, dan pencapaian kinerja dengan 20 hasil evaluasinya hanya bernilai 11,96. Dari skor yang diraih yang hanya berbobot 63,14, komponen yang paling mempengaruhi penilaian terletak pada perencanaan kerja yang selalu copy paste setiap tahunnya dan kurang selaras dengan Visi Misi Gubernur. Kemudian kekurangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terletak pada ketidakmampuan dalam menyusun indikator kinerja, serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran.

Menurut kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan kategori LAKIP sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kategori penilaian LAKIP

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	>0-30

Kinerja anggaran dikaitkan dengan *Value for Money* karena masih banyaknya anggaran yang belum dikelola secara ekonomi (biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran digunakan tidak berdasarkan pada kebutuhan atau skala prioritas, serta anggaran yang boros). Anggaran Provinsi Sulawesi Barat pada 4 tahun terakhir dari tahun 2017 (Rp. 2.070.695.605.444,16), tahun 2018 (Rp. 1.912.507.406.298,65), tahun 2019 (Rp. 2.111.982.588.654,89), dan tahun 2020 (Rp. 2.068.442.011.023,51). Belanja Tidak Langsung tahun 2017 (Rp. 997.114.399.947,06) sebesar 48%, tahun 2018 (Rp. 1.000.859.860.895,52) sebesar 52%, tahun 2019 (Rp. 1.073.946.543.811,06) sebesar 51%, dan tahun 2020 (Rp. 1.151.442.015.569,69) sebesar 56%. Belanja Langsung tahun 2017 (Rp. 1.073.581.205.497,10) sebesar 52%, tahun 2018 (Rp. 911.647.545.403,13) sebesar 48%, tahun 2019 (Rp. 1.038.036.044.843,83) sebesar 49% dan tahun 2020 (Rp. 916.999.995.453,82) sebesar 44%. (sumber : APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 sampai dengan tahun 2020). Belanja langsung merupakan gambaran dan

komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan masyarakat, sehingga menjadi sorotan tajam terhadap belanja langsung daerah yang masih rata-rata 48%.

Tuntutan baru agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini meningkatkan pelayanan melalui perwujudan *Value for Money* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. Pemerintah seharusnya bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tidak berdasar pada *Value for Money*. *Value for Money* harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, *Value for Money* merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai good governance yaitu Pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien.

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja dinilai kurang maksimal sehingga tujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum tercapai beberapa contohnya seperti kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan yang ditandai dengan tingginya angka kemiskinan sebesar 11,50% (sumber data: <https://sulbar.bps.go.id>), ketidakmampuan dalam menyusun indikator kinerja, masih rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, dan ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran oleh karena itu berdampak pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mendapatkan nilai B.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Pengawasan merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai organisasi (Hasibuan, 2014).

Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Semakin baik pengawasan maka kinerja anggaran akan terlaksana sesuai dengan target kinerja. Sehingga pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai tujuan, rencana, aturan yang telah digariskan. Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto., (2021).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Menteri dalam Negeri No 51 tahun 2010).

Selain pengawasan pengelolaan keuangan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menjalankan azas akuntabilitas

pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas kinerja pemerintah dapat dikatakan baik karena telah memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. Semakin kuat dan tinggi akuntabel pemerintah maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah. Victorinus Laoli., (2019), Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto., (2021), Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, Husni Thamrin., (2018).

Akuntabilitas finansial/keuangan adalah pertanggungjawaban lembagalembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan benar. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat. Dengan begitu kinerja pemerintah dapat dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. Hal ini berarti semakin transparan pengelolaan keuangan maka akan

semakin meningkat kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, dimana anggaran harus disajikan secara terbuka dan jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan oleh pemerintah. Keterbukaan pemerintah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak membutuhkan, dalam pengelolaan anggaran yang berorientasi ekonomi, efisien dan efektivitas dapat meningkatkan capaian suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan pemerintah. M. Iqbal Ashari1, M. Elfan Kaukab., (2020), Cindy Arifani., (2018), Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto., (2021), Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, Husni Thamrin., (2018).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang–undangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan penelitian M. Iqbal Ashari1, M. Elfan Kaukab., (2020), Cindy Arifani., (2018), dan Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto., (2021). Faktor yang kedua adalah akuntabilitas penelitian Victorinus Laoli., (2019), Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto., (2021), dan Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, Husni Thamrin., (2018). Faktor yang ketiga adalah transparansi pengelolaan keuangan penelitian M. Iqbal Ashari1, M. Elfan Kaukab.,

(2020), Cindy Arifani., (2018), Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto., (2021), dan Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, Husni Thamrin., (2018). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Cindy Arifani (2018) mengenai “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada variabel pengawasan yang merupakan variabel moderating, indikator, dimensi dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di pemerintah Kota Jaya Pura sedangkan penulis melakukan penelitian di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat?

2. Apakah Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat?
3. Variabel apakah yang dominan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang dominan pengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang “Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for*

Money pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat” diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Akademis

- a. Sebagai bahan studi ilmiah untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Penelitian ini diharapkan akan memperkaya hasil penelitian yang telah diadakan sebelumnya, serta sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian praktis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengevaluasi kinerjanya.
- b. Sebagai bahan kajian praktis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk merumuskan desain strategis dalam upaya peningkatan pengawasan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran berbasis *Value for Money*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan variable pengawasan keuangan, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja anggaran berbasis *Value for Money* adalah sebagai berikut:

1. Victorinus Laoli (2019) meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Pemerintah Kabupaten Nias. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Pemerintah Kabupaten Nias. Jenis penelitian ini asosiatif kausal, pengambilan data dengan kuesioner, dan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling* serta penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder dan diolah menggunakan alat bantu program statistik dengan pengujian analisis data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* sedangkan variabel transparansi secara parsial tidak berpengaruh. Dan secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

2. M. Iqbal Ashari, M. Elfan Kaukab (2020) meneliti tentang Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* di SKPD Kabupaten Banjarnegara. Pengambilan sampel dilakukan dengan slovin yang berjumlah 125 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis regresi linier berganda dengan X tingkat signifikan 5%. Hasil perhitungan dengan pengujian parsial (uji t) dimana variabel akuntabilitas tingkat signifikansinya sebesar 0.050, variabel transparansi tingkat signifikansinya sebesar 0.026, variabel pengawasan tingkat signifikansinya sebesar 0.010, variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah tingkat signifikansinya sebesar 0.293. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel transparansi dan pengawasan mempunyai pengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* sedangkan variabel Akuntabilitas dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada ASN bagian Bagian/Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Bendahara SKPD dan Operator Simda di Kabupaten Banjarnegara. Presentase pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, pemahaman SAP, dan kinerja anggaran berkonsep VFM pada ASN Bagian/Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Bendahara SKPD dan

Operator Simda di Kabupaten Banjarnegara sebesar 13,5%. Sedangkan sisanya sebesar 86,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

3. Cindy Arifani, Agustinus Salle, Andika Rante (2018) meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berdasarkan *Value for Money*. Penelitian ini dilakukan pada 28 instansi pemerintah di Kota Jayapura. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria sampel yaitu Kepala Bagian, Kepala Bagian Keuangan, dan Bendahara masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Jayapura. Jumlah sampel dalam penelitian ini kurang lebih 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berdasarkan *Value for Money*. Sedangkan transparansi mempengaruhi kinerja anggaran: pendekatan *Value for Money*, artinya semakin tinggi tingkat transparansi, semakin tinggi kinerja anggaran. Pengawasan mempengaruhi kinerja anggaran berdasarkan *Value for Money*. Artinya dengan meningkatnya pengawasan, kinerja anggaran akan meningkat juga.
4. Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto (2021) meneliti tentang Analisis Determinasi Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten

Tegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal. Desain penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Bappenda Kabupaten Tegal. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode sampling jenuh yaitu seluruh karyawan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal.

5. *Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, Husni Thamrin* (2018) meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep *Value for Money* pada Pemerintah di Kabupaten Dairi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, dan transparansi, terhadap kinerja pengelolaan keuangan berkonsep *Value for Money* pada pemerintah di Kabupaten Dairi. Penelitian ini dilaksanakan pada instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset pemerintah di Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat eksplanatif yaitu untuk melihat pengaruh beberapa variabel yang belum pasti. Penelitian Eksplanatif atau yang bersifat menerangkan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan kalau pengetahuan tentang masalahnya sudah cukup, artinya sudah

ada beberapa teori tertentu dan sudah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesa tertentu sehingga terkumpul berbagai generalisasi empiris. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner, dan observasi langsung. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan berkonsep *Value for Money*.

2.2 Pengawasan Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Halim dan Iqbal, (2012:37): “Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.”

Sedangkan menurut Sonny Sumarsono, (2010) mengemukakan bahwa “Pengawasan adalah Segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah di gariskan”. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sondang P. Siagian (2014:213) mengemukakan bahwa Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakuka berjalan sesuai dengan

rencana yang telah di tentukan. Saydam dalam kadarisman (2012:187) menjelaskan bahwa “Pengawasan merupakan kegiatan manajerial, dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan karyawan. Para karyawan yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan yang tidak memperoleh bimbingan”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajerial yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari berbagai kegiatan unit kerja agar sesuai dengan peraturan awal dari organisasi. Pengawasan ini tidak hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menentukan apa yang salah di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan dan sasaran utama organisasi.

2.2.2 Manfaat dan Keuntungan Pengawasan

Menurut Harahap (2012:313-315) yang mengemukakan apabila sistem pengawasan kerja itu dapat berjalan dengan baik berdasarkan standar pengawasan dan metode yang sesuai maka diperoleh berbagai manfaat atau keuntungan antara lain:

1. Tujuan yang dicapai akan lebih cepat, mudah dan murah.
2. Menimbulkan keterbukaan, kejujuran, dan keterusterangan.
3. Menimbulkan saling percaya dan menghilangkan rasa curiga.
4. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab.

5. Memberikan iklim persaingan yang sehat, sehingga karyawan berprestasi.

2.2.3 Prinsip-prinsip Dalam Proses Pengawasan

Menurut Koontz dan Cyril O'Donnel yang dikutip oleh Sukarna (2011:112).

Menetapkan atas prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut :

1. Prinsip tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*).
2. Prinsip efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*).
3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responbillity*).
4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*).
5. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*).
6. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*).
7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizational suitability*).
8. Prinsip azas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*).
9. Prinsip Standar (*Principle of standar*).
10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*).
11. Prinsip Kekecualian (*The expectation Primciple*).
12. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*).
13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*).
14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*).

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Prinsip Tercapainya Tujuan (*Principle of assurance of objective*).
- Pengawasan harus ditunjukkan kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan

mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.

2. Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*). Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang diluar dugaan.

3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responbility*). Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila mananjer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.

4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*). Pengawasan yang efektif harus ditunjukan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.

5. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*). Tekhmik control yang efektif adalah dengan mengusahakan adanya manajer yang berkualitas baik. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah.

6. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*). Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.

7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizational suitabillity*). Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi manajer dan bawahanya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan susunan organisasi.

8. Prinsip azas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*). Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer Teknik control harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup organisasi yang dibutuhkan ini beda satu sama lain, tergantung pada dan tingkat tugas manajer.
9. Prinsip Standar (*Principle of standar*). Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai.
10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*). Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
11. Prinsip Kekecualian (*The expection Primciple*). Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang dihadapkan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi kedalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.
12. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*). Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*). Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*). Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan Directing.

2.2.4 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

2.2.5 Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2011: “Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien”

Adapun menurut Sonny Sumarsono, (2010) pengertian pengawasan fungsional adalah sebagai berikut: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah.”

2.2.6 Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Daerah

Berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan, seperti yang dikutip Riawan Tjandra (2013:133) yaitu mengklasifikasikan pengawasan seperti berikut ini:

- a. Pengawasan dipandang dari sudut pandang kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol pengawasan yaitu:
 1. Kontrol Intern yakni pengawasan yang dilakukan oleh petugaspetugas yang masih dalam struktural pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan sebagai contoh yaitu pejabat atasan yang mengontrol kinerja bawahannya secara hierarkis.
 2. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugaspetugas atau badan-badan dari luar organisasi pemerintah dan juga tidak memiliki struktural didalamnya. Contohnya adalah pengawasan keuangan yang dilakukan oleh badan independen, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, media massa dan kelompok masyarakat yang berminat dalam bidang tertentu, baik kontrol politis yang dilakukan oleh MPR dan DPRD terhadap pemerintah eksekutif dan juga kontrol reaktif yang dilakukan oleh badan peradilan
- b. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan yaitu:

1. Pengawasan a-priori yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum disahkannya suatu keputusan atau ketetapan atas tindakan pemerintah pengawasan ini terjadi dalam proses pembahasan dimana pengawasan ini juga dapat disebut sebagai pengawasan yang mengandung unsur preventifnya artinya pengawasan ini mencegah sebelum terjadinya kekeliruan.
 2. Pengawasan a-posteriori yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah atau juga disebutkan sebagai pengawasan represif yang artinya pengawasan dalam hal penanggulangan setelah terjadinya tindakan pemerintah yang telah dianggap merugikan negara.
- c. Pengawasan yang dilakukan dari aspek yang diawasi yaitu:
1. Pengawasan dari segi hukum yaitu pengawasan yang menilai dari aspek- aspek hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya. Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum sehingga dalam melakukan setiap kegiatan harus jelas landasan hukumnya.
 2. Pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu melihat aspek dimana suatu tindakan ataupun keputusan pemerintah sudah tepat atau belum terhadap kemanfaatan bagi rakyat karena salah tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat dan yang menjalankan negara adalah pemerintah.

2.2.7 Fungsi Pengawasan Keuangan

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan:
“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Selain kewenangan pengawasan seperti di atas, DPRD juga melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam kerangka fungsi pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain melakukan pembahasan atau menindaklanjuti beberapa hal terkait kinerja pemerintah daerah antara lain laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah”.

Menurut Pedansa (2013) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD pada kesempatan ini meliputi: “Pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pengawasan berupa Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); Persetujuan DPRD Atas Rencana Kerjasama Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD; Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan Studi Komperasi; Pelaksanaan Konsultasi; Pelaksanaan Reses; Pengelolaan Aspirasi; Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP); dan Pelaksanaan Rapat Kerja. Pengawasan oleh DPRD dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif, pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi relevan”.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pada pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban.

Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap penyusunan dan pelaporan APBD.

2.2.8 Karakteristik Pengawasan Keuangan

Siswanto (2009:149) mengemukakan secara umum terdapat Sembilan karakteristik pengawasan atau pengendalian yang efektif, yaitu:

1. Akurat (*Accurate*).
2. Tepat waktu (*Timely*).
3. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehesible*).
4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focus on strategic control points*).
5. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*).
6. Secara organisasi realistis (*Organizationally realistic*).
7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the organization's work flow*).
8. Fleksibel (*Flexible*).
9. Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*).

10. Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organization members*).

Adapun penjelasan dari karakteristik-karakteristik pengawasan keuangan diatas adalah sebagai berikut:

1. Akurat (*Accurate*)

Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan permasalahan baru.

2. Tepat waktu (*Timely*)

Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.

3. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehesible*)

Informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka objektif sistem pengendalian, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan efektif akan merespons informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias yang tidak perlu dan kebingungan atau frustasi diantara para karyawan.

4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focus on strategic control points*)

Sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengendalian

strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

5. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)

Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

6. Secara organisasi realistis (*Organizationally realistic*)

Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. Selain itu, semua standar untuk kinerja harus realistic. Perbedaan status di antara individu harus dihargai juga.

7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the organization's work flow*)

Informasi pengendalian perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan di seluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengendalian harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya.

8. Fleksibel (*Flexible*)

Sistem pengendalian yang efektif harus dapat mengikuti perkembangan yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

9. Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*)

Pengendalian yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan.

10. Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organization members*)

Agar sistem pengendalian dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengendalian tersebut harus berhubungan dengan tujuan dan prinsip yang berarti sehingga dapat diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan. Dengan diterimanya sistem pengendalian, maka setiap anggota akan merasa ikut bertanggung jawab terhadap usah mencapai tujuan.

2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011:89): “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Sedangkan menurut Bastian (2010:11): “Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan system pemerintahan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas adalah “Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.”

Definisi akuntabilitas menurut Lloyd, et al dalam A Ebrahim, (2010) adalah sebagai berikut: “*The processes through which an organization makes a commitment to respond to and balance the needs of stakeholders in its decision making processes and activities, and delivers against this commitment.*”

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya.

2.3.2 Tujuan Akuntabilitas

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:23) bahwa: “Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*prinsipal*)”.

Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

2.3.3 Tipe-Tipe Akuntabilitas

Tipe Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya dibagi menjadi dua bagian menurut Ihyaul Ulum (2010:42) yaitu :

1. Akuntabilitas Internal
2. Akuntabilitas Eksternal

Berikut ini penjelasan dari beberapa macam tipe akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.3.4 Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik terdiri dari dua macam menurut Mahmudi (2015:9)

yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya

2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas Horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Sedangkan menurut Ihyaul Ulum (2010:41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

- a. Integritas Keuangan
- b. Pengungkapan

2. Akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban mengenai:

- a. Kinerja organisasi
- b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2.3.5 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas,

penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD”.

2.3.6 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10) meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yangtelah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara *vertikal* maupun *horizontal* kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *Value for Money*, yang mencakup:

- a. Ketidakhematan

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar,

kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

b. Ketidakefektifan

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakankebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar

dapat sesegera mungkindicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup:

2.3.7 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Adisasmita (2011:81): “Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam pertanggungjawaban ini yaitu berupa laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2016:11): “Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisiensi dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.”

Akuntabilitas finansial menurut Lewis dalam jurnal Mgadla Xaba and Duminase Ngubane (2010) adalah sebagai berikut *“Financial accountability describes the systems and procedures used to keep track of financial and monetary transactions that take place inside an organisation and therefore it is a system of recording, classifying and summarising information for various purposes.*

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan adalah pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik mengenai integritas keuangan, pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berupa laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait.

2.3.8 Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Dimensi Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut Hopwood dan Tomkins, Elwood, dalam Mahmudi (2013:9) sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customernya. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat

laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak pertama.

2.4 Transparansi Pengelolaan Keuangan

2.4.1 Pengertian Transparansi Pengelolaan Keuangan

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Menurut Adisasmitha, (2011:39): “Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.”

Menurut Amitai Etzioni (2010) transparansi didefinisikan adalah sebagai berikut: *“Transparency is generally defined as the principle of enabling the public to gain information about the operations and structures of a given entity. Transparency is often considered synonymous with openness and disclosure, although one can find some subtle differences among these terms.”*

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010) menyebutkan bahwa: “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.”

Sedangkan Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah: “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.”

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan transparansi adalah akses yang mendasar dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi secara terbuka dan mudah untuk di akses.

2.4.2 Karakteristik Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2015:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu:

1. Informatif (*Informative*)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

f. Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan (*Disclosure*) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

b. Susunan Pengurus

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.5 Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

2.5.1 Pengertian Kinerja Anggaran

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan.

Menurut Bastian (2010: 171) dijelaskan bahwa: Anggaran kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi.

Mardiasmo (2015: 84) mengemukakan: Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem anggaran yang mencakup tujuan dan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan struktur organisasi pemerintah harus sesuai dengan program organisasi pemerintah tersebut.

Kegiatan tersebut mencakup pula pada penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan

moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, organisasi atau unit organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja, tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin dicapai. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (*output*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (*outcome*) dari program yang telah ditetapkan.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *Value for Money* atau pengawasan atas kinerja *output*. Dalam pengukuran kinerja *Value for Money*, menurut Mardiasmo (2015) efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- (1) Efisiensi alokasi, dan

Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal.

- (2) efisiensi teknis atau manajerial.

Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu”. Kedua efisiensi tersebut merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan atas pertimbangan keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat.

2.5.2 Konsep *Value for Money*

Menurut Mahmudi (2015: 83), menyatakan bahwa: *Value for Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik yang memiliki

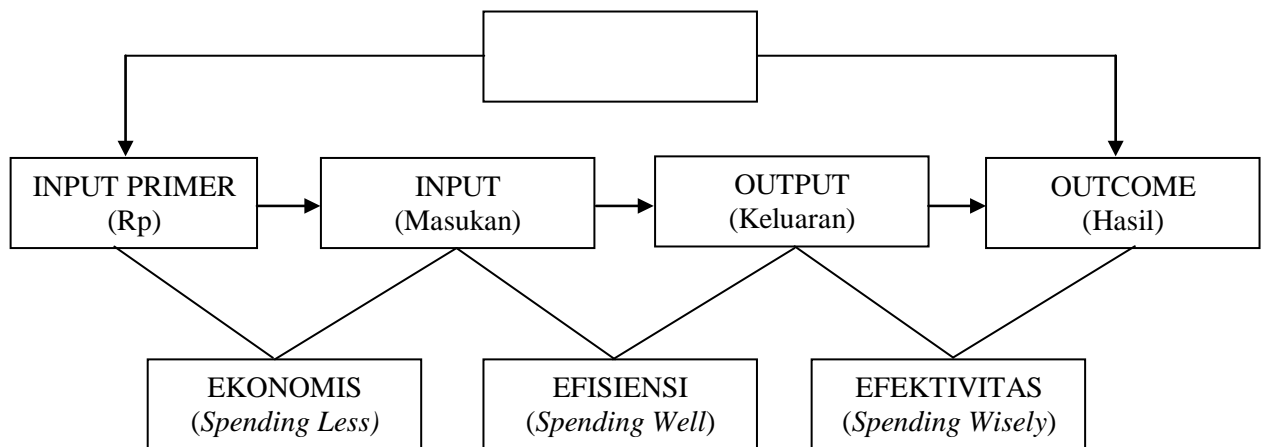
pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *Value for Money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.

Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal, serta efektif artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Value for Money merupakan sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan dari input, output, dan *outcome*. Kegagalan organisasi sektor publik untuk mendapatkan input dari pada harga yang semestinya menyebabkan tidak terpenuhinya indikator ekonomi. Selanjutnya, input yang terlalu mahal akan mengakibatkan efisiensi yang pada akhirnya akan mengarah pada ketidak efektifnya pencapaian program secara keseluruhan.

Value for Money secara skematis dapat dilihat dari gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1
***Value for Money* secara skematis**



Value for Money (3E)

(Sumber: Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2014:163))

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2015:83), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah:

1. Ekonomi: konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar.
2. Efisiensi: efisien terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau istilah lain *output per unit input*.
3. Efektivitas: efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan.

Sedangkan untuk indikator *Value for Money* dibagi menjadi dua bagian (Mardiasmo, 2015: 130), yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)

Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*).

Ada empat langkah dalam pengukuran *Value for Money* (Mardiasmo, 2015:133), yaitu:

1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi merupakan pengukuran relatif, pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah :

- a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dalam konsep *Value for Money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengukuran *Outcome*

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif yang terkait dengan penilaian kinerja masa lalu dan peran prospektif yang terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik (Renyowijoyo, 2013:5), antara lain:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan *publik cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, pengawasan memiliki pengaruh yang penting. Hal ini disebabkan karena dalam pencapaian keberhasilan dibutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal. Kebijakan pengawasan tersebut dalam jangka panjang lebih diarahkan kepada tindakan pencegahan, perbaikan sistem dan manajemen pembangunan, sedangkan dalam jangka pendek lebih diarahkan kepada pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan seluruh penyebab timbulnya inefisiensi.

Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Akuntansi kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *Good Government* dalam mengelola organisasi publik.

Pemerintah telah merancang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Government Governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga - lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

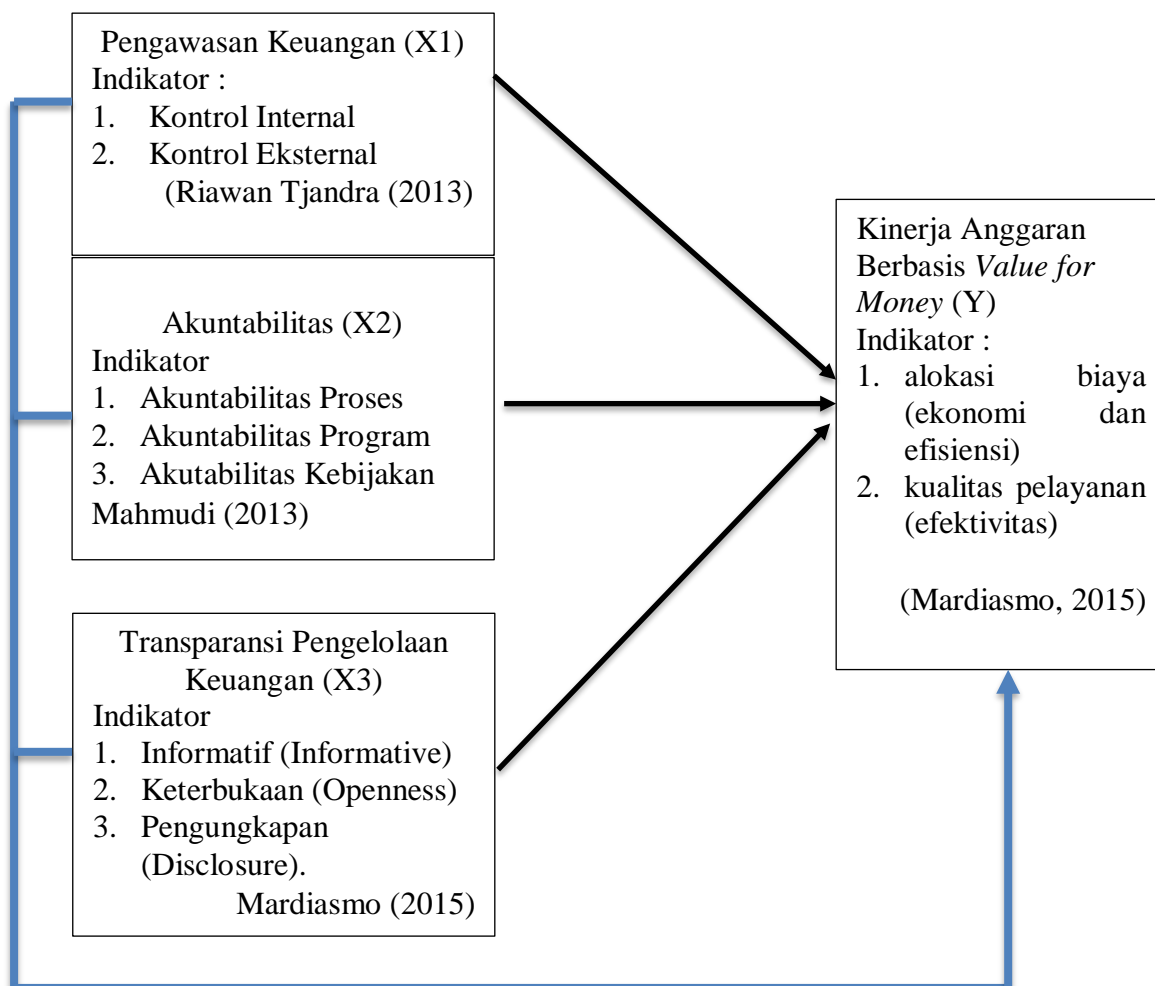
Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menolak anggaran tradisional karena yang menganggap apabila tidak ada campur tangan terhadap anggaran, maka pemerintah akan menyalahgunakan kedudukannya dan melakukan pemborosan terhadap anggaran. Menurut pendekatan kinerja dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan audit keuangan, dan audit kinerja. Dengan kata lain pemerintah dipaksa harus dapat bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efisien, serta menggunakan dana secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara Bersama-sama. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E . Ekonomis adalah hemat atau tepat guna, efisien adalah *Output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya, dan efektivitas adalah kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara garis besar penerapan penilaian kinerja dengan konsep *Value for Money* dibagi menjadi dua indikator kinerja, yaitu: 1) Indikator alokasi biaya (meliputi elemen ekonomi dan efisiensi), dan 2) Indikator kualitas pelayanan (elemen efektivitas). Menurut Mardiasmo dalam jurnal Nugrahani (2007), penerapan konsep *Value for Money* (VFM) penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut akan memberi manfaat.

Dari pemaparan tersebut di atas, maka disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Konseptual Penelitian



3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh secara parsial Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

- H2 : Terdapat pengaruh secara parsial Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- H3 : Terdapat pengaruh secara parsial Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- H4 : Terdapat pengaruh secara simultan Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- H5 : Variabel pengawasan keuangan yang dominan berpengaruh terhadap kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

- a. Pengawasan keuangan daerah (X_1) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2011: “Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan

yang telah direncanakan secara efektif dan efisien”. Indikator pengawasan adalah:

- a. Kontrol Intern yakni pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang masih dalam struktural pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan sebagai contoh yaitu pejabat atasan yang mengontrol kinerja bawahannya secara hierarkis.
 - b. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas atau badan-badan dari luar organisasi pemerintah dan juga tidak memiliki struktural didalamnya.
- b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan (X_2)

Menurut Adisasmita (2011:81): “Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam pertanggungjawaban ini yaitu berupa laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.” Adapun indikatornya menurut Hopwood dan Tomkins, Elwood, dalam Mahmudi (2013:9):

1. Akuntabilitas Proses
 2. Akuntabilitas Program
 3. Akuntabilitas Kebijakan
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah (X_3)

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010): “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.” Adapun indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2015:19):

1. Informatif (Informative)
 2. Keterbukaan (Openness)
 3. Pengungkapan (Disclosure).
2. Variable Terikat (*Dependen Variabel*) Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*.

Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas program dan kegiatan suatu organisasi. Indikatornya adalah alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan kualitas pelayanan (efektivitas).

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kausal (causal), Umar (2008) menyebutkan desain kausal bermanfaat untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, juga bermanfaat pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian survei yang merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap beberapa anggota sampel dari suatu populasi tertentu yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner (Sekaran, 2003).

Sugiyono (2014:81) menyimpulkan bahwa penelitian survei merupakan sebuah metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini mengenai keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku maupun hubungan variabel, selain daripada itu penelitian survei bertujuan untuk menguji beberapa hipotesis mengenai variabel sosiologis dan psikologis dari sampel atas populasi tertentu, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan baik wawancara ataupun kuesioner tidak mendalam dan hasil penelitian cenderung digeneralisasikan.

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden atau sumber asli dalam bentuk kuisisioner. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan

menganalisis Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Provinsi Sulawesi Barat.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan pertimbangan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh dan akurat serta sangat relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian selama 1 bulan yaitu bulan Agustus 2021 sampai September 2021.

4.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inspektur Pembantu (IRBAN) pada Inspektorat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Sub Bagian Keuangan pada Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 94 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode sensus/survei, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel

4.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Sugiyono (2014, hlm. 92) menyatakan bahwa “Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala *Likert*. Sugiyono (2014, hlm. 134) menyatakan bahwa “Skala *Likert* digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial”.

4.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan peneliti adalah data primer, yaitu dengan memberikan kuesioner/daftar pertanyaan kepada pegawai yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu (IRBAN) pada Inspektorat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Sub Bagian Keuangan pada Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, *Value for Money*, pengendalian intern dan akuntabilitas pengelolaan keuangan hasil modifikasi atas kuesioner Mulyani (2018), Apriliana (2019) dan Septiani (2016). Kuesioner akan diberikan langsung kepada 96 responden dimana terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mewakili variabel-variabel dalam penelitian ini, dan dalam hal ini terdapat pilihan atas pertanyaan yang mewakili skala pengukuran tertentu

4.6 Skala dan Pengukuran data

Pengukuran data penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap obyek (Nazir, 2009). Penggunaan skala Likert karena pertimbangan sebagai berikut: (1) mempunyai banyak kemudahan; (2) mempunyai realibilitas yang tinggi dalam

mengurutkan subyek berdasarkan persepsi; (3) fleksibel dibanding teknik yang lain; (4) aplikatif pada berbagai situasi. Pengolahan data, skala Likert termasuk dalam skala interval. Penentuan skala Likert dalam penelitian ini dari skala 1 sampai dengan 5. Pedoman untuk pengukuran semua variabel adalah dengan menggunakan 5 poin likert scale. kategori dari masing-masing jawaban dengan suatu kriteria sebagai berikut: Sangat Baik/Sangat Setuju (skor 5): Baik/Setuju (skor 4); Cukup baik/ Netral (skor 3); Tidak Baik/Tidak Setuju (skor 2): Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju (skor 1) (Malhotra, 2010; Cooper & Seindler, 2003).

4.7 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu metode dengan cara menganalisa data yang diperoleh untuk mencari ada tidaknya pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Provinsi Sulawesi Barat.

Data yang telah terkumpul akan di analisis menggunakan dua macam teknik statistik, yaitu teknik statistik deskriptif dan teknik statistik inferensial. Statistik deskriptif dipergunakan untuk mendeskripsikan karakteristik skor responden penelitian untuk masing-masing variabel, dengan menggunakan rata-rata, standar deviasi, skor maksimum, skor minimum, dan tabel frekuensi. Statistik inferensial dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian yang belum terjawab melalui statistik deskriptif. Untuk keperluan tersebut dipergunakan analisis regresi linier ganda.

4.7.1 Uji Prasyarat Analisis

Uji Prasyarat Analisis Sebelum data diolah dan dianalisa menggunakan analisis regresi linier berganda, maka perlu dilakukan uji persyaratan asumsi klasik, statistik terlebih dahulu. Adapun uji asumsi klasik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak, dengan kata lain sampel dari populasi yang berbentuk data berdistribusi normal atau tidak pada penelitian ini pengujian normalitas digunakan untuk menguji data variabel Pengawasan Keuangan (X1), Akuntabilitas (X2), Transparansi Pengelolaan Keuangan (X3) dan Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* (Y). Uji normalitas yang digunakan adalah analisis *Kolmogorov-Smirnov* (Herawati, 2016).

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi tinggi atau sempurna antar Variabel (Arum Janie, 2012). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas antar variabel bebas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (1) dengan melihat nilai toleransinya. Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai toleransinya lebih besar 0,10. (2) dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor). Tidak terjadi multikolinieritas jika nilai VIF lebih kecil 10,00.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Arum Janie (2012), Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan variance dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Ada dua cara pendeteksian ada tidaknya heterokedastisitas yaitu metode grafik dan metode statistik. Pengujian pada penelitian ini menggunakan metode grafik. Untuk mengetahui apakah terjadi heterokedastisitas bahwa pada grafik *scatterplot* titik-titik tidak menyebar secara acak baik atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Arum janie, 2012). Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi menggunakan uji Run Test, pengambilan keputusan jika nilai Signifikasi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi, begitupun sebaliknya.

4.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*). Analisis linier berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) yang ditunjukkan oleh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Provinsi Sulawesi Barat.

Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda syarat uji regresi yang harus dipenuhi adalah:

Bentuk umum dari model yang akan digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (1)$$

Dimana:

Y = Kinerja Anggaran Provinsi Sulawesi Barat

a = konstanta

X₁ = Pengawasan keuangan

X₂ = Akuntabilitas pengelolaan keuangan

X₃ = Transparansi pengelolaan keuangan

b₁, b₂, b₃ = Koefisien pengaruh

e = Kesalahan Prediksi

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu: Pengawasan Keuangan (X₁), Akuntabilitas (X₂), Transparansi Pengelolaan Keuangan (X₃), (X₄) terhadap variabel terkait yaitu Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Y) secara bersama-sama, maka dilakukan uji F.

Kemudian untuk mengetahui pengaruh : Pengawasan Keuangan (X₁), Akuntabilitas (X₂), dan Transparansi Pengelolaan Keuangan (X₃), terhadap variabel terkait yaitu Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Y) secara simultan maka dilakukan uji t.

a. Pengujian hipotesis pertama, kedua

Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan pada analisis dihasilkan dari model regresi berganda.

- a) H_0 berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) H_a berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- c) Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan dengan *degree of freedom* $(n - k - 1)$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independent. Sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5% dan $df = (n - 1)$, sehingga (Ghozali, 2006)

b. Pengujian hipotesis ketiga

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut:

- a) H_0 : berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) H_a : berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ dan dengan *degree of freedom* (k) dan $(n - k - 1)$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen. Maka nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut.

$$F = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}} \quad (2)$$

Dimana:

R^2 = R Square

n = Banyaknya Data

k = Banyaknya variabel independen

Sedangkan F tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan α sebesar 5% dan $df = (n-1)$, sehingga (Ghozali, 2006)

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig. F < 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yakni secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig. F > 5\%$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yakni secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Gambaran Singkat Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004. Ibu kotanya ialah Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16,796.19 km². Suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%). Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa dan cengkeh. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batubara dan minyak bumi. Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas 5 (lima) Kabupaten memiliki jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk BPS pada tahun 2010 berjumlah 1.158.336 jiwa. Wilayah Povinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran Nasional dan Internasional memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi kedepan. Salah satu pelabuhan antar pulau yang aktif melayani/ menghubungkan pulau Kalimantan adalah Pelabuhan Fery Simboro Mamuju, Pelabuhan Rakyat Palipi Majene, Pelabuhan Rakyat Mamuju, Pelabuhan Samudra Belang-belang Bakengkeng Mamuju yang telah mulai dikembangkan dan

beroperasi untuk kapal penumpang maupun barang seperti pengangkutan minyak CPO dan mangan, serta sejumlah Pelabuhan lain yang dikelola oleh perusahaan swasta nasional di Kabupaten Mamuju Utara.

Disamping itu Bandar Udara Tampapadang berjarak 27 km dari Kota Mamuju, sementara ini mempunyai landasan pacu 2.500 m x 80 m, kondisi ini menggambarkan bahwa bandara tersebut sudah dapat didarati pesawat komersil ukuran Boeing 737 200 yang berpenumpang hingga 150 orang. Untuk sementara ini, bandara Tamba Padang yang merupakan jembatan udara menghubungkan Makassar – Mamuju dan Mamuju – Balikpapan.

Kondisi topografi Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari laut dalam, daratan rendah, dataran tinggi dan pegunungan dengan tingkat kesuburan yang tinggi, disamping itu letaknya yang sangat strategis pada posisi silang segitiga emas Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah lewat pantai barat dengan jarak 445 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, 447 Km dari Palu Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dan Selat Makassar/ Kalimantan Timur, memberikan potensi perencanaan pembangunan yang harus ditata dengan baik. Sehingga kekayaan yang terkandung di dalam alam Sulawesi Barat dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Bertolak dari semangat "Allamungan Batu di Luyo" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar. Semangat "Sipamandar" inilah, sehingga sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Mandar yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A.

Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan, namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok, kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polman. Pada masa penjajahan, wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah bagian dari 7 wilayah pemerintahan yang dikenal dengan nama Afdeling Mandar yang meliputi empat onder afdeling, yaitu Onder Afdeling Majene beribukota Majene, Onder Afdeling Mamuju beribukota Mamuju, Onder Afdeling Polewali beribukota Polewali, Onder Afdeling Mamasa beribukota Mamasa. Onder Afdeling Majene, Mamuju dan Polewali yang terletak di sepanjang

garis pantai barat pulau Sulawesi mencakup 7 wilayah kerajaan (Kesatuan Hukum Adat) yang dikenal dengan nama Pitu Baqbana Binanga (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai) yang meliputi : Balanipa di Onder Afdeling Polewali(dipimpin oleh Ambo Caca Daeng Magasing),Binuang di Onder Afdeling Polewali,Sendana di Onder Afdeling Majene, Banggae/Majene di Onder Afdeling Majene,Pamboang di Onder Afdeling Majene,Mamuju di Onder Afdeling Mamuju,Tappalang di Onder Afdeling Mamuju.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulawesi Selatan sebagaimana di atas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi.

Sejak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali Mamasa) resmi terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Provinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).ada pun gubernur pertama yakni Oentarto Sindung Mawardi,yang memimpin sejak tanggal 16 oktober 2004 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2005,kemudian di gantikan oleh Syamsul Arif Rivai sejak tanggal 21 Oktober 2005 sampai dengan 14 Desember 2006,kemudian di gantikan oleh H.Anwar Adnan Saleh sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan 14 Desember 2016 selama sepuluh tahun menjabat sebagai gubernur, setelah masa jabatannya selesai kemudian di gantikan oleh Sekretaris Daerah Ismail Zainuddin

mulai tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, setelah itu di gantikan lagi pejabat Gubernur Irjen Pol Carlo Brix Tewu sampai hasil pemilihan gubernur di umumkan dan dilantik.

Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau ‘yang terlupakan’ di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting yaitu jaraknya yang cukup jauh dari ibukota provinsi (Makassar); kondisi geografisnya yang bergunung gunung dengan sarana prasarana jalan yang buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar dan beberapa kelompok sub etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) pada awal tahun 1960an.

Sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999 – 2000, dan sempat menjadi ‘aikon nasional’ gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan ‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama ‘tentara pembelot’ (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain sebagai daerah lintas gunung dan hutan untuk memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya. Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah Sulawesi Barat masih dalam proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh permasalahan permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum memiliki titik temu.

Berada pada jalur segitiga Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ~ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- ~ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sulawesi Selatan
- ~ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sulawesi Selatan
- ~ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kalimantan Timur.

(Sumber: <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/blog/sulawesi-barat>).

b. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Provinsi Sulawesi Barat

Visi

Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq

“Maju” Komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan provinsi lainnya yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.

“Malaqbiq” Komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang berpengatahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius.

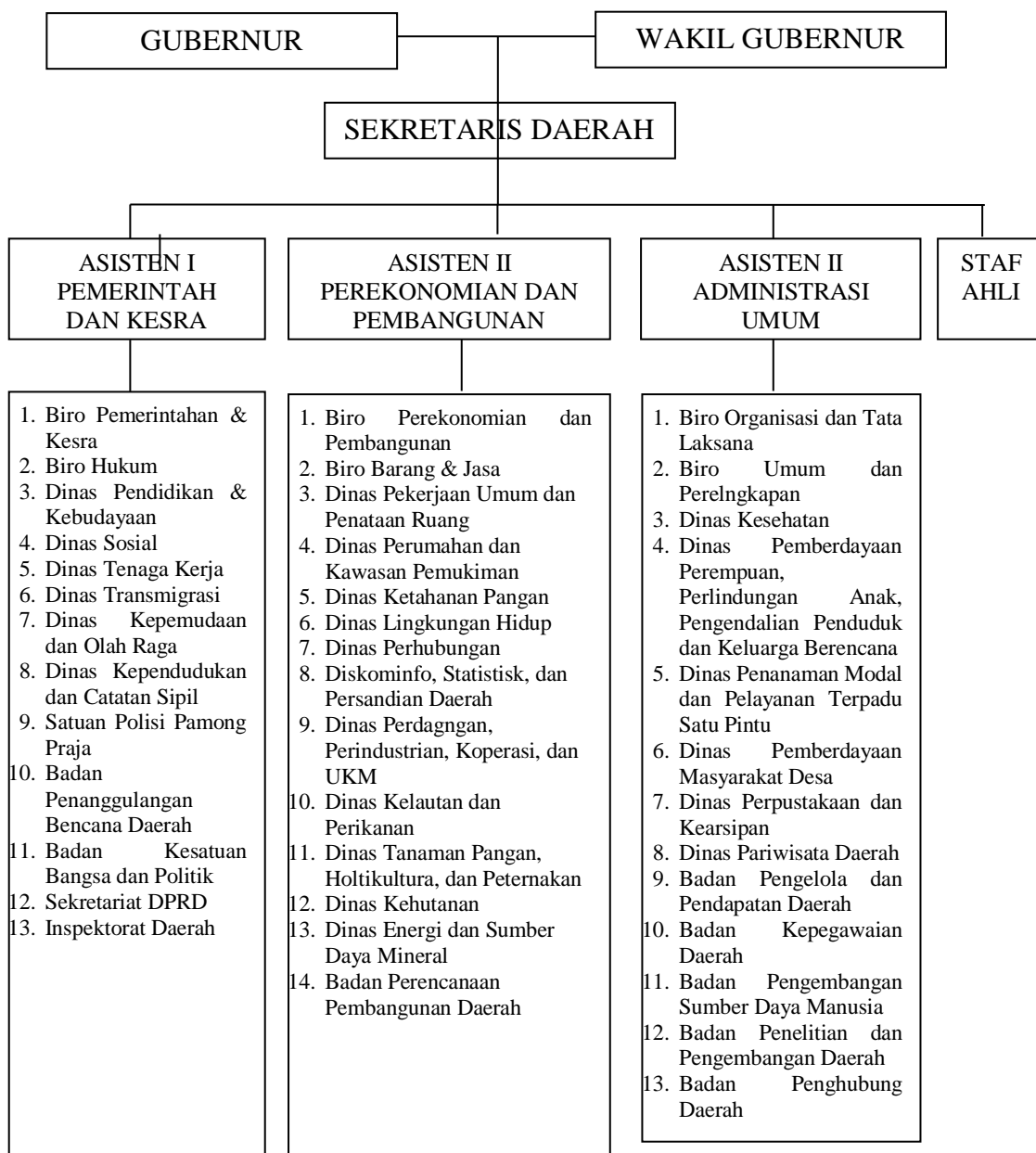
Misi

- Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya;
- Mewujudkan pemerintahan bersih, modern dan terpercaya;
- Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi;
- Mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

c. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari skema di bawah ini:

Gambar 5.1
Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat



5.1.2 Deskripsi Data

Populasi dalam penelitian ini adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 3 orang, Sekretaris Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 34 orang, Kasubag Program dan Pelaporan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 23 orang, Kasubag Keuangan dan Aset Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 23 orang, dan Kasubag Program dan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 11 orang. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada responden yang terpilih menjadi sampel.

Pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 31 Agustus sampai tanggal 30 September 2021. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada para pegawai yang menjadi sampel penelitian. Peneliti menetapkan janji untuk pengambilan kuesioner selama 1 minggu terhitung sejak kuesioner diantarkan kepada responden atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara responden dan peneliti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 94 responden.

Tabel 5.1 Deskripsi Responden

No.	Jabatan Responden	Jumlah
1.	Inspektur Pembantu	3 Orang
2.	Sekretaris Perangkat Daerah	34 Orang
3.	Kasubag Program & Pelaporan	23 Orang
4.	Kasubag Keuangan & Aset	23 Orang
5.	Kasubag Program & Keuangan	11 Orang
Jumlah		94 Orang

Sumber : Hasil olah data primer 2021

5.1.3 Karakteristik Responden

Jumlah pegawai atau sumber daya manusia yang bertugas pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dijadikan sampel pada penelitian ini sebanyak 94 orang.

Di bawah ini akan dipaparkan karakteristik responden secara umum menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan masa kerja responden bekerja di Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin bukan menjadi ukuran bagi seorang pegawai di dalam menentukan mampu tidaknya bekerja. Akan tetapi yang terpenting adalah kemampuan pengelolaan Keuangan yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri..

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	57	60,6
2	Perempuan	37	39,4
Jumlah		94	100,00

Sumber : Hasil olah data primer 2021

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas, menunjukkan bahwa dari 94 responden dalam penelitian ini, terdapat 57 (60,6%) responden laki-laki sedangkan sisanya 37 (39,4%) adalah responden perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih banyak dibanding responden perempuan. Komposisi yang demikian diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai.

2. Usia

Usia merupakan variabel yang sangat menentukan tingkat Pengawasan Keuangan pegawai pada sebuah instansi. Dengan tingkat usia yang masih produktif akan berpengaruh terhadap kemampuan pengelolaan keuangan yang tentunya akan memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk mengetahui usia responden dalam penelitian ini disajikan karakteristik responden yang menjadi subyek dalam penelitian ini menurut usia ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.3

Deskripsi Responden Berdasarkan Kelompok Usia

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	20 – 30 Tahun	2	2,1
2	31 – 40 Tahun	24	25,5
3	41 – 50 Tahun	42	44,7
4	>50 Tahun	26	27,7
Jumlah		94	100

Sumber : Hasil olahan data primer, 2021

Dari Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa dari 94 responden terdapat 2 (2,1%) responden yang berusia antara 20 – 30 tahun, 24 (25,5%) responden yang berusia antara 31–40 tahun, 42 (44,7%) responden yang berusia antara 41– 50 tahun dan 26 (27,7%) responden yang berusia di atas 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi usia responden terkonsentrasi pada usia antara 31– 50 tahun atau masih dalam kategori usia produktif. Faktor usia sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, merupakan salah satu identitas yang dapat menjadi petunjuk

untuk mengetahui kemampuan fisik dan kemampuan daya pikir seseorang. Semakin tua usia seseorang semakin tinggi tingkat kematangan berpikirnya dalam proses pencapaian tujuan yang hendak dicapai, Kualitas dan meningkatkan kinerjanya karena masih didukung oleh kekuatan fisik energi yang menunjang untuk menjalankan aktifitas kepegawaiannya.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat kemampuan pegawai dapat dipengaruhi oleh pendidikan formal yang diperolehnya. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang pegawai diyakini akan semakin tinggi kemampuannya dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan melakukan evaluasi terhadap program kerja yang dibebankan kepadanya, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pendidikan formal adalah suatu indikator yang dapat mengukur kemampuan Pengawasan Keuangan pegawai Pemprov Sulawesi Barat untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dengan baik. Untuk hal tersebut maka perlu diperhatikan adalah penempatan pegawai yang harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S3	1	1,1
2	S2	49	52,1
3	S1	43	45,7
4	Diploma Tiga (D3)	1	1,1
Jumlah		94	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2021

Pada Tabel 5.4 di atas, tentang tingkat pendidikan responden pegawai Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa 1 orang (1,1%) adalah lulusan Doktor (S3), 49 orang (52,1%) adalah lulusan Magister (S2), 43 orang (45,7%) lulusan Sarjana (S1), dan 1 orang (1,1%) adalah lulusan Diploma Tiga (D3). Dengan demikian prosentasi responden terbesar pada tingkat pendidikan Strata Satu

Di samping itu adanya pegawai yang berpendidikan Strata Dua yang merupakan aset yang sangat baik dalam membimbing pegawai lainya dalam rangka meningkatkan Pengawasan Keuangan dan Akuntabilitas sebagai wadah dalam peningkatan Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya. Seiring dengan penerapan otonomi daerah, pembangunan disegala bidang khususnya pengembangan sumber daya manusia menuntut pegawai yang berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persaingan pegawai menuntut adanya profesionalisme kerja yang semakin tinggi dan bekal keahlian yang memadai.

Tentunya pegawai tersebut didukung oleh jenjang pendidikan yang diperolehnya atau dengan kata lain latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai dapat mempengaruhi Akuntabilitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok yang pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap Kualitas kerja. Berdasarkan data pendidikan formal Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sekarang ini sangat mendukung Pengawasan Keuangan dan Akuntabilitas kerja pegawai menuju peningkatan Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* dan termasuk dalam kategori sangat mendukung.

4. Masa Kerja

Masa kerja adalah lamanya seseorang menjadi pegawai yang sekaligus merupakan pengalaman kerja pegawai yang bersangkutan. Masa kerja ini berkaitan dengan proses belajar dengan rentang waktu tertentu setiap aparatur belajar untuk lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas serta belajar mengembangkan diri. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa dalam rentang waktu tertentu setiap pegawai dalam lingkungan tertentu dapat belajar dari keberhasilan dalam melaksanakan tugas, baik dirinya maupun orang lain. Dengan demikian semakin lama masa kerja seorang pegawai, tentunya kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, demikian pula sebaliknya. Dengan masa kerja yang relatif lama diharapkan pengalaman, profesionalisme serta Pengawasan Keuangan seorang pegawai semakin tinggi. Jika diperinci masa kerja responden, maka dapat disajikan dalam tabel 5.5.

Tabel 5.5

Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1	< 5 Tahun	0	0
2	5 - 10 Tahun	6	6,4
3	10 - 20 Tahun	53	56,4
4	> 20 Tahun	35	37,2
Jumlah		94	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2021

Data Tabel 5.5 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 94 responden terdapat 6 orang (6,4%) responden yang memiliki masa kerja antara 5–10 tahun, 53

(56,4%) responden yang memiliki masa kerja antara 10 – 20 tahun dan 35 orang (37,2%) yang memiliki masa kerja diatas 20 tahun hal ini menunjukkan bahwa komposisi masa kerja responden terkonsentrasi di atas 5 tahun. Kondisi ini akan sangat menguntungkan karena masa kerja yang relatif lama akan melahirkan tingkat kematangan berpikir dan kematangan dalam proses peningkatan kualitas pekerjaan atau kinerja. Selain itu masa kerja di atas 15 tahun memberikan gambaran bahwa pada umumnya responden telah memiliki kemampuan dan pengalaman kerja yang sangat tinggi sehingga diharapkan bahwa dengan masa kerja yang relatif lama ini dapat meningkatkan Pengawasan Keuangan pada masa yang akan datang dalam mendukung peningkatan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Di samping itu dengan masa kerja responden di atas 15 tahun dapat diasumsikan bahwa responden tersebut telah memiliki banyak pengalaman kerja sehingga sangat memudahkan responden dalam menyelesaikan tugas keseharian mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat masa kerja pegawai akan berpengaruh baik pada Pengawasan Keuangan maupun terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* .Namun demikian dalam banyak kasus, lamanya masa kerja seorang pegawai tidak menjadi jaminan bahwa kemampuan mereka sudah baik dan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

5.1.4 Deskripsi Data Hasil Penelitian

Deskripsi data hasil penelitian memberikan gambaran mengenai distribusi data baik berupa tabel frekuensi, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Hasil perhitungan statistik deskriptif secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran. Adapun masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan Keuangan (X1)

Deskripsi Pengawasan Keuangan didasarkan pada 9 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Tanggapan responden terhadap ke 9 pertanyaan tentang Pengawasan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6
Deskripsi Responden Terhadap Pengawasan Keuangan

Indikator	Kriteria					Total	Rata-Rata
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju		
Saya berperan penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan anggaran	5 (5.3%)	46 (48.9%)	34 (36.2%)	9 (9.6%)	0	94 (100%)	3.5
Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran	20 (21.3%)	30 (31.9%)	36 (38.3%)	8 (8.5%)	0	94 (100%)	3.66
Pengawasan anggaran dilakukan secara internal dan eksternal	4 (4.3%)	46 (48.9%)	44 (46.8%)	0	0	94 (100%)	3.57
Pimpinan atau atasan secara langsung dan rutin menilai kinerja bawahan pengguna anggaran	3 (3.2%)	57 (60.6%)	28 (29.8%)	6 (6.4%)	0	94 (100%)	3.61
Pimpinan SKPD mengontrol dan memonitoring setiap penggunaan anggaran oleh PPK	3 (3.2%)	59 (62.8%)	26 (27.7%)	6 (6.4%)	0	94 (100%)	3.63
DPRD secara aktif mengawasi mekanisme penggunaan anggaran	19 (20.2%)	36 (38.3%)	36 (38.3%)	3 (3.2%)	0	94 (100%)	3.76
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap anggaran adalah secara preventip dan repretif	7 (7.4%)	48 (51.1%)	28 (29.8%)	11 (11.7%)	0	94 (100%)	3.54
DPRD secara aktif melakukan pengawasan anggaran dengan menugaskan BPK	18 (19.1%)	39 (41.5%)	32 (41.5%)	5 (5.3%)	0	94 (100%)	3.74
Rata-Rata Pengawasan Keuangan							3,63

Berdasarkan tabel di atas, maka tanggapan responden yang berkaitan dengan item Pengawasan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut

- 1) Saya berperan penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan anggaran, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,5.
- 2) Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,66.
- 3) Pengawasan anggaran dilakukan secara internal dan eksternal, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,57.
- 4) Pimpinan atau atasan secara langsung dan rutin menilai kinerja bawahan pengguna anggaran, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,61.
- 5) Pimpinan atau atasan secara langsung dan rutin menilai kinerja bawahan pengguna anggaran, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,63.
- 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara aktif mengawasi mekanisme penggunaan anggaran, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,63.
- 7) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap anggaran adalah secara preventif dan repressif, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,76.
- 8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara aktif melakukan pengawasan anggaran dengan menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,54.
- 9) Revisi anggaran dilakukan dengan alasan skala prioritas, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,74.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata Pengawasan Keuangan umumnya berkategori tinggi dengan rata-rata 3,63.

2. Akuntabilitas (X2)

Deskripsi Akuntabilitas didasarkan pada 9 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Tanggapan responden terhadap ke 9 pertanyaan tentang Akuntabilitas dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut:

Tabel 5.7

Deskripsi Responden Terhadap Akuntabilitas

Indikator	Kriteria					Total	Rata-Rata
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju		
Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat	9 (9.6%)	45 (47.9%)	33 (35.1%)	6 (6.4%)	1 (1.1%)	94 (100%)	3.59
Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat	6 (6.4%)	49 (52.1%)	19 (20.2%)	20 (21.3%)	0	94 (100%)	3.44
Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran	6 (6.4%)	50 (53.2%)	35 (37.2%)	3 (3.2%)	0	94 (100%)	3.63
Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu	6 (6.4%)	37 (39.4%)	44 (46.8%)	7 (7.4%)	0	94 (100%)	3.45
Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran	8 (8.5%)	36 (38.3%)	29 (30.9%)	21 (22.3%)	0	94 (100%)	3.33
Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus-menerus	4 (4.3%)	39 (41.5%)	40 (42.6%)	11 (11.7%)	0	94 (100%)	3.38
Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu	18 (19.1%)	35 (37.2%)	31 (33.0%)	10 (10.6%)	0	94 (100%)	3.65
Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/ sesungguhnya	14 (14.9%)	38 (40.4%)	38 (40.4%)	3 (3.2%)	1 (1.1%)	94 (100%)	3.65

Indikator	Kriteria					Total	Rata-Rata
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju		
Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan kepada masyarakat luas (horizontal)	13 (13.8%)	41 (43.6%)	36 (38.3%)	4 (4.3%)	0	94 (100%)	3.67
Rata-Rata Akuntabilitas							3,53

Berdasarkan tabel di atas, maka tanggapan responden yang berkaitan dengan item Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai berikut

- 1) Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,59.
- 2) Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,44.
- 3) Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,63.
- 4) Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,45.
- 5) Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,33.
- 6) Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus-menerus, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,38.
- 7) Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,65.
- 8) Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya, pada umumnya responden

mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,65. 9) Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan kepada masyarakat luas (horizontal), pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,67. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata Akuntabilitas umumnya berkategori tinggi dengan rata-rata 3,53.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan (X3)

Deskripsi Transparansi Pengelolaan Keuangan didasarkan pada 9 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Tanggapan responden terhadap ke 9 pertanyaan tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut:

Tabel 5.8

Deskripsi Responden Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan

Indikator	Kriteria					Total	Rata-Rata
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju		
Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi	8 (8.5%)	49 (52.1%)	36 (38.3%)	0	1 (1.1%)	94 (100%)	3.67
Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan ransparansi anggaran	8 (8.5%)	48 (51.1%)	27 (28.7%)	11 (11.7%)	0	94 (100%)	3.56
Mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran	11 (11.7%)	45 (47.9%)	18 (19.1%)	20 (21.3%)	0	94 (100%)	3.5
Sulit untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran karena birokratis	6 (6.4%)	39 (41.5%)	42 (44.7%)	7 (7.4%)	0	94 (100%)	3.47
Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran	9 (9.6%)	36 (38.3%)	43 (45.7%)	5 (5.3%)	1 (1.1%)	94 (100%)	3.5
Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu	8 (8.5%)	36 (38.3%)	43 (45.7%)	7 (7.4%)	0	94 (100%)	3.48

Indikator	Kriteria					Total	Rata-Rata
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju		
Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan/suara rakyat	7 (7.4%)	33 (35.1%)	28 (29.8%)	26 (27.7%)	0	94 (100%)	3.22
Pengumuman tentang anggaran bisa didapat setiap waktu	14 (14.9%)	42 (44.7%)	26 (27.7%)	11 (11.7%)	1 (1.1%)	94 (100%)	3.61
Pengumuman kebijakan anggaran mudah didapatkan oleh publik	6 (6.4%)	39 (41.5%)	42 (44.7%)	7 (7.4%)	0	94 (100%)	3.47
Rata-Rata Akuntabilitas							3,5

Berdasarkan tabel di atas, maka tanggapan responden yang berkaitan dengan item Transparansi Pengelolaan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut

- 1) Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,67.
- 2) Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan ransparansi anggaran, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,56.
- 3) Mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,5.
- 4) Sulit untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran karena birokratis, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,47.
- 5) Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,5.
- 6) Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,48.
- 7) Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan/suara rakyat, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,22.
- 8) Pengumuman tentang anggaran bisa didapat setiap waktu, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,61.
- 9) Pengumuman kebijakan anggaran mudah

didapatkan oleh publik, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,47. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata Transparansi Pengelolaan Keuangan umumnya berkategori tinggi dengan rata-rata 3,5.

4. Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Deskripsi Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* didasarkan pada 11 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Tanggapan responden terhadap ke 11 pertanyaan tentang Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.9
Deskripsi Responden Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Indikator	Kriteria					Total	Rata-Rata
	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju		
Anggaran dikelola dengan memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep <i>Value for Money</i> yang berorientasi kepada kepentingan publik	6 (6.4%)	52 (53.3%)	33 (35.1%)	3 (3.2%)	0	94 (100%)	3.65
Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif	4 (4.3%)	56 (59.6%)	34 (36.2%)	0	0	94 (100%)	3.68
Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan	7 (7.4%)	34 (36.2%)	47 (50.0%)	6 (6.4%)	0	94 (100%)	3.45

Indikator	Kriteria					Total	Rata-Rata
	Indikator	Kriteria	Total	Rata-Rata			
Anggaran dikelola secara adil (<i>equity</i>) dan merata (<i>equality</i>) dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas	7 (7.4%)	44 (46.8%)	37 (39.4%)	6 (6.4%)	0	94 (100%)	3.55
Anggaran dikelola secara merata (<i>equality</i>) dan penggunaan dana publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu	7 (7.4%)	50 (53.2%)	34 (36.2%)	3 (3.2%)	0	94 (100%)	3.65
Kualitas Pelayanan	16 (17.0%)	43 (45.7%)	26 (27.7%)	9 (9.6%)	0	94 (100%)	3.7
Adanya peran pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah	17 (18.1%)	31 (33.0%)	30 (31.9%)	16 (17.0%)	0	94 (100%)	3.52
Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik	6 (6.4%)	52 (55.3%)	26 (27.7%)	10 (10.6%)	0	94 (100%)	3.57
Anggaran selalu digunakan secara efisien dan hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan	2 (2.1%)	58 (61.7%)	34 (36.2%)	0	0	94 (100%)	3.66
Penerapan prinsip ekonomi, efisien, dan efektif dalam penggunaan anggaran	5 (5.3%)	49 (52.1%)	28 (29.8%)	12 (12.8%)	0	94 (100%)	3.5
Rata-Rata Akuntabilitas							3,57

Berdasarkan tabel di atas, maka tanggapan responden yang berkaitan dengan item Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* dapat diuraikan sebagai

berikut 1) Anggaran dikelola dengan memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *Value for Money* yang berorientasi kepada kepentingan publik, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,65. 2) Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,68. 3) Anggaran dikelola secara efisien dengan penggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,54. 4) Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,45. 5) Anggaran dikelola secara adil (*equity*) dan merata (*equality*) dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,55. 6) Anggaran dikelola secara merata (*equality*) dan penggunaan dana publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,65. 7) Adanya peran pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,7. 8) Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,52. 9) Anggaran selalu digunakan secara efisien dan hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,57. 10) Penerapan prinsip ekonomi, efisien, dan efektif dalam penggunaan anggaran, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,6. 11) *Value for Money*

merupakan jembatan untuk mengantar pemerintah mencapai Good Governance yaitu pemerintah yang akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, serta efektif, pada umumnya responden mengemukakan setuju dengan rata-rata 3,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* umumnya berkategori tinggi dengan rata-rata 3,57.

5.1.5 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

1) Hasil uji validitas instrumen variabel Pengawasan Keuangan (X_1)

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan menggunakan analisis korelasi dengan bantuan komputer (SPSS-25), ternyata menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid ($\text{sig. } r_{\text{hit}} < \alpha$ 0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 5.10

Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Keuangan (X_1)

Indikator	r hit	r Tabel	Ket	
X1	X1_1	0.873	0.2028	Valid
	X1_2	0.844	0.2028	Valid
	X1_3	0.802	0.2028	Valid
	X1_4	0.819	0.2028	Valid
	X1_5	0.831	0.2028	Valid
	X1_6	0.888	0.2028	Valid
	X1_7	0.921	0.2028	Valid
	X1_8	0.891	0.2028	Valid
	X1_9	0.900	0.2028	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.10 maka diperoleh angka korelasi (r hitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2028. Nilai Correction Item Total Correlation (r hitung) variabel pengawasan keuangan (X_1)

berada diantara 0,802 – 0,900. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung $> 0,2028$ (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada Pengawasan Keuangan (X1) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2) Hasil uji validitas instrumen variabel Akuntabilitas X₂)

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan menggunakan analisis korelasi berbantuan komputer (SPSS-25), ternyata menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid ($\text{sig. } r_{\text{hit}} < \alpha$ 0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 5.11
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X₂)

Indikator	r hit	R Tabel	Ket
X2_1	0.912	0.2028	Valid
X2_2	0.899	0.2028	Valid
X2_3	0.920	0.2028	Valid
X2_4	0.888	0.2028	Valid
X2_5	0.863	0.2028	Valid
X2_6	0.866	0.2028	Valid
X2_7	0.937	0.2028	Valid
X2_8	0.912	0.2028	Valid
X2_9	0.898	0.2028	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.11 maka diperoleh angka korelasi (r hitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2028. Nilai Correction Item Total Correlation (r hitung) variabel akuntabilitas (X₂) berada diantara 0,863 – 0,937. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung $> 0,2028$ (r

tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada akuntabilitas (X2) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3) Hasil uji validitas instrumen variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan (X₃)

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan menggunakan analisis korelasi berbantuan komputer (SPSS-25), ternyata menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid ($\text{sig. } r_{\text{hit}} < \alpha$ 0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 5.12

Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan (X₃)

Indikator	r hit	r tabel	Ket
X3_1	0.885	0.2028	Valid
X3_2	0.880	0.2028	Valid
X3_3	0.889	0.2028	Valid
X3_4	0.937	0.2028	Valid
X3_5	0.859	0.2028	Valid
X3_6	0.882	0.2028	Valid
X3_7	0.605	0.2028	Valid
X3_8	0.840	0.2028	Valid
X3_9	0.937	0.2028	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.12 maka diperoleh angka korelasi (r hitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2028. Nilai Correction Item Total Correlation (r hitung) variabel transparansi pengelolaan keuangan (X₃) berada diantara 0,605 – 0,937. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2028 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada transparansi pengelolaan keuangan (X₃) adalah valid atau mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4) Hasil uji validitas instrumen variabel Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* (Y)

Dari instrumen yang diujicobakan, ditentukan koefisien korelasi dengan menggunakan analisis korelasi berbantuan komputer (SPSS-25), ternyata menunjukkan bahwa semua item instrumen tersebut dinyatakan valid ($\text{sig. } r_{\text{hit}} < \alpha$ 0.05), dengan hasil selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 5.13

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* (Y)

Indikator	r hit	Sig	Ket	
Y	Y_1	0.887	0.2028	Valid
	Y_2	0.882	0.2028	Valid
	Y_3	0.916	0.2028	Valid
	Y_4	0.816	0.2028	Valid
	Y_5	0.888	0.2028	Valid
	Y_6	0.887	0.2028	Valid
	Y_7	0.893	0.2028	Valid
	Y_8	0.858	0.2028	Valid
	Y_9	0.868	0.2028	Valid
	Y_10	0.901	0.2028	Valid
	Y_11	0.914	0.2028	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.13 maka diperoleh angka korelasi (rhitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2028. Nilai Correction Item Total Correlation (rhitung) variabel kinerja anggaran berbasis *Value for Money* (Y) berada diantara 0,816 – 0,916. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2028 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kinerja anggaran berbasis *Value for Money* (Y) adalah valid atau

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi instrumen. Semua instrumen dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi, jika instrumen tersebut memberikan hasil yang tetap. Ini berarti bahwa instrumen dikatakan reliabel apabila diujicobakan pada subyek lain dan dalam waktu yang lain pula akan mempunyai hasil yang sama. Hasil uji realibilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 5.14 berikut :

Tabel 5.14
Hasil Uji Reliabilitas

No. Item	Variabel	Nilai Alfha Crombach's	Cut of Point	Ket
1	Pengawasan Keuangan (X ₁)	0.955	0.50	Realibel
2	Akuntabilitas (X ₂)	0.969	0.50	Realibel
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan (X ₃)	0.950	0.50	Realibel
4	Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i> (Y)	0.967	0.50	Realibel

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

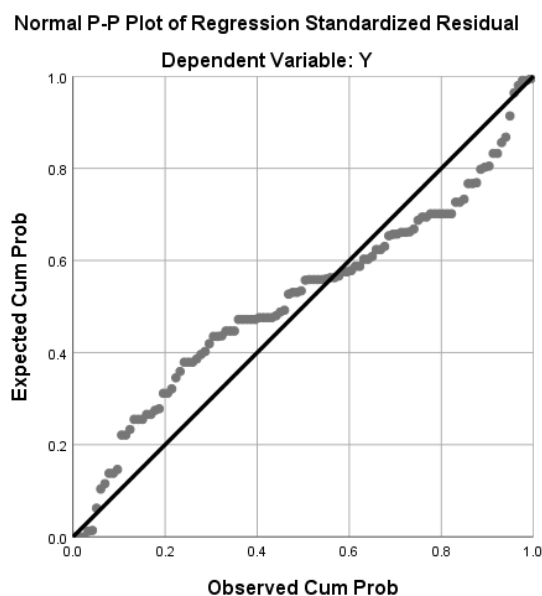
Dari Tabel 5.14 pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha* dapat diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas yang diukur adalah $\geq 0,50$. Berdasarkan hasil pengolahan data pada uji reliabilitas ini diperoleh nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach's Alpha*) untuk variabel pengawasan keuangan (X₁) sebesar 0,955; variabel akuntabilitas (X₂) sebesar 0,969; variabel transparansi pengelolaan keuangan (X₃) sebesar 0,950 dan variabel kinerja anggaran berbasis *Value for*

Money (Y) sebesar 0,967. Karena seluruh nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel berada diatas ambang batas (*cut of point*) 0,50, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati tidak. Cara mendeteksi normalitas dilakukan dengan cara yaitu dengan analisis grafik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 2006). Uji normalitas data dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 5.2
Uji Normalitas Data



Dengan melihat tampilan grafik Normal P-Plot dapat disimpulkan bahwa pola distribusi data mendekati normal. Hal tersebut terlihat dari sebaran titik-titik pada grafik mendekati garis diagonal.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas dilihat pada Tabel 5.14 berikut.

Tabel 5.15
Hasil Uji Multikolinearitas Data

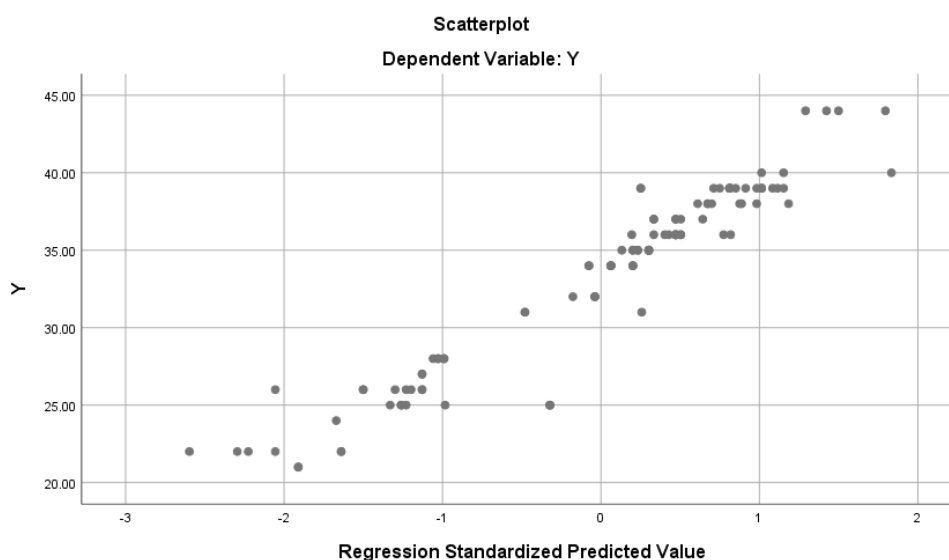
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	0,169	5.915
X2	0,203	4.920
X3	0,141	7.096

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunyai nilai *Tolerance* dibawah 1 dan nilai VIF di bawah 10. Dari Tabel 5.15 dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* berada di bawah 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas pada variable X1, X2 dan X3.

e. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada akuntan dengan menggunakan uji glejser ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 5.3
Hasil Uji Glejser



Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser diperoleh bahwa data tersebar diatas dan dibawah titik nol pada sumbu Y. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dan hasil uji dapat dilanjutkan.

5.1.6 Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik regresi. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.16
Hasil Regresi Berganda

Model	B	T	P (sig)
Constant	1,049	1,175	0.243
Pengawasan Keuangan (X ₁),	0,782	11,994	0.000
Akuntabilitas (X ₂)	0,217	3,959	0.000
Transparansi Pengelolaan Keuangan (X ₃)	0,191	2,769	0.007

Sumber : Data diolah, 2021

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi

$$\hat{y} = 1,049 + 0,782 X_1 + 0,217 X_2 + 0,191 X_3 \quad (3)$$

Dimana:

Y = Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

X₁ = Pengawasan Keuangan

X₂ = Akuntabilitas

X₃ = Transparansi Pengelolaan Keuangan

β = Koefisien Regresi

α = Konstanta

e = Error Term

Berdasarkan hasil pengamatan regresi linier berganda di atas dapat menjelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 1.049. Hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dianggap tidak ada atau bernilai nol maka skor variabel akuntabilitas kinerja akan semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja anggaran berbasis *Value for Money*

sangatlah membutuhkan pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan untuk dapat semakin meningkat.

- b. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,782 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel pengawasan keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*. Semakin meningkatnya nilai pengawasan keuangan, maka akan semakin meningkat pula nilai dari kinerja anggaran berbasis *Value for Money*.
- c. Koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,217 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*. Semakin meningkatnya nilai akuntabilitas, maka akan semakin meningkat pula nilai dari kinerja anggaran berbasis *Value for Money*.
- d. Koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,191 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel transparansi pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*. Semakin meningkatnya nilai transparansi pengelolaan keuangan, maka akan semakin meningkat pula nilai dari kinerja anggaran berbasis *Value for Money*.

2. Uji Statistik

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan statistik t dan statistik F. Uji statistik t digunakan untuk menguji signifikansi secara parsial yaitu masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan ataukah tidak terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi $\alpha=5$ persen. Uji statistik F digunakan untuk menguji signifikansi secara simultan yaitu secara bersama-sama apakah

variabel independen (Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan) berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* dengan tingkat signifikansi $\alpha=5$ persen.

a. Uji F (Uji Simultan)

Pada tabel 5.16 pengujian secara simultan (uji F), dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Tabel 5.17
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squars	Df	Mean square	F	P
Regression	4634.603	3	1544.868	641.157	0,000
Residual	216.855	90	2.409		
Total	4851.457	93			

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.17, didapatkan nilai F statistik sebesar 641.157 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa secara simultan ada pengaruh signifikan antara Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

b. Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas antara Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan

berpengaruh signifikan ataukah tidak terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tingkat signifikansi $\alpha=5$ persen secara terpisah atau parsial. Berikut hasil pengujian hipotesis uji t:

Tabel 5.18
Hasil Uji Parsial

Model	B	T	P (sig)
Constant	1,049	1,175	0.243
Pengawasan Keuangan (X_1), Akuntabilitas (X_2)	0,782	11,994	0.000
Transparansi Pengelolaan Keuangan (X_3)	0,191	2,769	0.007

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.18 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka disimpulkan H1 diterima, artinya Pengawasan Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Pengaruh *Akuntabilitas* terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka disimpulkan H1 diterima, artinya *Akuntabilitas* berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- 3) Pengaruh *Transparansi Pengelolaan Keuangan* terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$, maka disimpulkan H1 diterima, artinya *Transparansi Pengelolaan Keuangan*

berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

3. Uji Beta dan Koefisien Determinasi (R^2)

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen (Y) dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized tertinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.19
Hasil Uji Beta

Model	Beta	Sig
Constanta		0.243
X ₁	0,650	0.000
X ₂	0,196	0.000
X ₃	0,164	0.007

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel yang meliputi Pengawasan Keuangan , Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Sedangkan variabel yang dominan berpengaruh berdasarkan nilai beta tertinggi adalah variabel Pengawasan Keuangan (X₁).

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Menurut ahli dalam Ghozali (2006) menganjurkan untuk

menggunakan nilai *adjusted R²* untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independennya. Hal ini dikarenakan nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Hasil perhitungan koefisien determinasi *adjusted (R²)* pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Tabel 5.20 berikut:

Tabel 5.20
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.977	.955	.954	1.55226

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan output SPSS pada tabel 5.20 di atas tampak bahwa dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) pada sebesar 0,955, hal ini berarti koefisien determinasi pengaruh Pengawasan Keuangan (X_1), Akuntabilitas (X_2) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan (X_3) terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* (Y) sebesar 0,955 atau 95,5% variasi Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* (Y) dipengaruhi oleh Pengawasan Keuangan (X_1), Akuntabilitas (X_2) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan (X_3). Sedangkan sisanya 4,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

5.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, selanjutnya akan dibahas hasil penelitian sebagai berikut:

5.2.1 Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*, hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Ashari, M. Elfan Kaukab (2020) yang menemukan bahwa variabel pengawasan tingkat signifikansinya sebesar 0.010, Cindy Arifani, Agustinus Salle, Andika Rante . (2018) yang menemukan bahwa Pengawasan mempengaruhi kinerja anggaran berdasarkan *Value for Money*. Artinya dengan meningkatnya pengawasan, kinerja anggaran akan meningkat juga. Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto (2021) yang menemukan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan agar kinerja anggaran dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati,

memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Halim dan Iqbal, 2012:37). Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku (Baswir, 2014:129).

Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto., (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Semakin baik pengawasan maka kinerja anggaran akan terlaksana sesuai dengan target kinerja. Sehingga pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai tujuan, rencana, aturan yang telah digariskan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Iqbal Ashari¹, M. Elfan Kaukab., (2020) yang mengatakan bahwa Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah sebelum program atau kegiatan dilaksanakan, dalam pengelolaan anggaran yang berorientasi ekonomi, efisien dan efektivitas dapat meningkatkan capaian suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan pemerintah. Begitupula dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto., (2021) yang mengatakan bahwa Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Semakin baik pengawasan maka akan kinerja anggaran akan terlaksana sesuai dengan target kinerja. Sehingga

pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai tujuan, rencana, aturan yang telah digariskan.

Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk variabel Pengawasan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk pernyataan “Saya berperan penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan anggaran” sebagian besar responden setuju (46 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (34 orang) dan sisanya menyatakan tidak setuju (9 orang) dan sangat setuju (5 orang).
2. Untuk pernyataan “Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran” sebagian besar responden netral (36 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan setuju (30 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (20 orang) dan tidak setuju (8 orang).
3. Untuk pernyataan “Pengawasan anggaran dilakukan secara internal dan eksternal” sebagian besar responden setuju (46 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (44 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (4 orang).
4. Untuk pernyataan “Pimpinan atau atasan secara langsung dan rutin menilai kinerja bawahan pengguna anggaran” mayoritas responden setuju (57 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (28 orang), sisanya menyatakan tidak setuju (6 orang) dan sangat setuju (3 orang).
5. Untuk pernyataan “Pimpinan atau atasan secara langsung dan rutin menilai kinerja bawahan pengguna anggaran” mayoritas responden setuju (59 orang)

dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (26 orang), sisanya menyatakan tidak setuju (6 orang) dan sangat setuju (3 orang).

6. Untuk pernyataan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara aktif mengawasi mekanisme penggunaan anggaran” sebagian besar responden menyatakan netral (35 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan setuju (29 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (20 orang) dan tidak setuju (10 orang).
7. Untuk pernyataan “Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap anggaran adalah secara preventif dan repressif” sebagian besar responden menyatakan netral (36 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan setuju (36 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (19 orang) dan tidak setuju (3 orang).
8. Untuk pernyataan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara aktif melakukan pengawasan anggaran dengan menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)” sebagian besar responden menyatakan setuju (48 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (28 orang), sisanya menyatakan tidak setuju (11 orang) dan sangat setuju (7 orang).
9. Untuk pernyataan “Revisi anggaran dilakukan dengan alasan skala prioritas” sebagian besar responden menyatakan setuju (39 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (32 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (18 orang) dan tidak setuju (5 orang).

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 1 yang menyatakan variable pengawasan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diterima.

5.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara nyata terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* . Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Victorinus Laoli (2019) yang menemukan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*, Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto (2021) juga menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal.

Sedangkan hal berbeda didapatkan oleh M. Iqbal Ashari, M. Elfan Kaukab (2020) yang menemukan bahwa variabel Akuntabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *for money*. Begitu juga penelitian yang dilakukan Cindy Arifani, Agustinus Salle, Andika Rante . (2018) yang juga menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berdasarkan *Value for Money*, artinya semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka kinerja anggaran akan semakin tinggi. Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, Husni Thamrin (2018).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011:89). Selanjutnya, Mahmudi (2007:11) menjelaskan bahwa akuntabilitas finansial/keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisiensi, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah. Victorinus Laoli., (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan Good Corporate Governance di mana pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk variabel Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk pernyataan “Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat” sebagian besar responden setuju (45 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (33 orang, sisanya menyatakan sangat setuju (9 orang) dan tidak setuju (6 orang) serta sangat tidak setuju (1 orang).
2. Untuk pernyataan “Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat” mayoritas responden setuju (49 orang) dan sebagian lainnya menyatakan tidak setuju (20 orang), netral (19 orang), dan sangat setuju (6 orang).
3. Untuk pernyataan “Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran” mayoritas responden menyatakan setuju (50 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (35 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (6 orang), dan tidak setuju (3 orang).
4. Untuk pernyataan “Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu” sebagian besar responden menyatakan netral (44 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan setuju (37 orang), sisanya menyatakan tidak setuju (7 orang), dan sangat setuju (6 orang).
5. Untuk pernyataan “Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran” sebagian besar responden menyatakan setuju (36 orang) dan sebagian lainnya menyatakan netral (29 orang), dan tidak setuju (21 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (8 orang).

6. Untuk pernyataan “Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus-menerus” sebagian besar responden menyatakan netral (40 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan setuju (39 orang), sisanya menyatakan tidak setuju (11 orang), dan sangat setuju (4 orang).
7. Untuk pernyataan “Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu” sebagian besar responden menyatakan setuju (35 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (31 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (18 orang), dan tidak setuju (10 orang).
8. Untuk pernyataan “Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya” sebagian besar responden menyatakan netral (38 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan setuju (38 orang), sisanya menyatakan sangat (14 orang), dan tidak setuju (3 orang).
9. Untuk pernyataan “Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (*vertical*) dan kepada masyarakat luas (*horizontal*)” sebagian besar responden menyatakan setuju (41 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (36 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (13 orang), dan tidak setuju (4 orang).

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 2 yang menyatakan variable akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diterima.

5.2.3 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja Anggaran berbasis *Value for Money*, ini menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara nyata terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Ashari, M. Elfan Kaukab (2020) yang menemukan bahwa variabel transparansi tingkat signifikansinya sebesar 0.026 yang berarti variabel transparansi mempunyai pengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* di Kabupaten Banjarnegara. Cindy Arifani, Agustinus Salle, Andika Rante . (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi mempengaruhi kinerja anggaran: pendekatan *Value for Money*, artinya semakin tinggi tingkat transparansi, semakin tinggi kinerja anggaran. Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto (2021) yang juga menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal. Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, Husni Thamrin (2018) yang menemukan bahwa transparansi, memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan berbasis *Value for Money*. Sedangkan hasil berbeda didapatkan oleh Victorinus Laoli (2019) yang menemukan bahwa variabel transparansi secara parsial tidak berpengaruh. terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Adisasmita, 2011:39). Selanjutnya, Mardiasmo (2004:30) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Dalam pengambilan keputusan tersebut diperlukan informasi akuntansi salah satunya berupa laporan keuangan. Selain pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi kepada publik, sehingga public dapat mengetahui, memberi kritik dan saran, serta mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga pemerintah akan lebih hati-hati dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian akan melahirkan kinerja pemerintah yang lebih baik.

M. Iqbal Ashari¹, M. Elfan Kaukab., (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. Keterbukaan pemerintah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan, dalam pengelolaan anggaran yang berorientasi ekonomi, efisien dan efektivitas dapat meningkatkan capaian suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan pemerintah.

Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk pernyataan “Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi” mayoritas responden menyatakan setuju (49 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (36 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (8 orang), dan sangat tidak setuju (1 orang).
2. Untuk pernyataan “Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan ransparansi anggaran” mayoritas responden menyatakan setuju (48 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan netral (27 orang), sisanya menyatakan tidak setuju (11 orang), dan sangat setuju (8 orang).
3. Untuk pernyataan “Mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran” sebagian besar responden menyatakan setuju (45 orang), sisanya menyatakan tidak setuju (20 orang), netral (18 orang), dan sangat setuju (11 orang).
4. Untuk pernyataan “Sulit untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran karena birokratis” sebagian besar responden menyatakan netral (42 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan setuju (39 orang), sisanya menyatakan tidak setuju (7 orang), dan sangat setuju (6 orang).
5. Untuk pernyataan “Musrebang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran” sebagian besar responden menyatakan netral (43 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan setuju (36 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (9 orang), tidak setuju (5 orang), dan sangat tidak setuju (1 orang).

6. Untuk pernyataan “Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu” sebagian besar responden menyatakan netral (43 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan setuju (36 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (8 orang), dan tidak setuju (7 orang).
7. Untuk pernyataan “Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan/suara rakyat” sebagian besar responden menyatakan setuju (33 orang) dan sebagian lainnya menyatakan netral (28 orang), tidak setuju (26 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (7 orang).
8. Untuk pernyataan “Pengumuman tentang anggaran bisa didapat setiap waktu” sebagian besar responden menyatakan setuju (42 orang), dan lainnya menyatakan netral (26 orang), sisanya menyatakan sangat setuju (14 orang), dan tidak setuju (11 orang).
9. Untuk pernyataan “Pengumuman kebijakan anggaran mudah didapatkan oleh publik” sebagian besar responden menyatakan netral (42 orang) dan sebagian besar lainnya menyatakan setuju (39 orang), sisanya menyatakan tidak setuju (7 orang), dan sangat setuju (6 orang).

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 3 yang menyatakan variable transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diterima.

5.2.4 Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.23 menunjukkan bahwa nilai F hitung seluruh variabel independent sebesar 641,157 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Adapun kriteria dalam uji simultan ini ialah ketika seluruh variabel independent memiliki nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05.

F tabel pada penelitian ini ialah sebesar 2,71. Hal ini menunjukkan bahwa $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ ($641,157 > 2,71$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ketiga variabel ini akan sangat efektif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada tahun-tahun kedepannya. Dengan meningkatkan pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan secara bersama-sama maka bukan tidak mungkin kinerja anggaran berbasis *Value for Money* akan ikut meningkat.

Hasil penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Victorinus Laoli (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* Pada Pemerintah Kabupaten Nias, M. Iqbal Ashari, M. Elfan Kaukab (2020) yang

menyatakan bahwa transparansi dan pengawasan bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* di SKPD Kabupaten Banjarnegara, Cindy Arifani, Agustinus Salle, Andika Rante (2018) yang menyatakan bahwa transparansi dan pengawasan bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Kota Jayapura, Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah, dan Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, Husni Thamrin (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Pemerintah di Kabupaten Dairi.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 4 yang menyatakan variabel pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama (Simultan) terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diterima.

5.2.5 Variabel yang Paling Dominan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Berdasarkan hasil nilai beta standardised diketahui bahwa variabel-variabel yang meliputi Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value*

for Money pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedangkan variabel yang dominan berpengaruh adalah variabel Pengawasan Keuangan (X_1).

Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Halim dan Iqbal, 2012:37). Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku (Baswir, 1999:129).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Ashari, M. Elfan Kaukab (2020) yang menemukan bahwa variabel pengawasan tingkat signifikansinya sebesar 0.010, Cindy Arifani, Agustinus Salle, Andika Rante . (2018) yang menemukan bahwa Pengawasan mempengaruhi kinerja anggaran berdasarkan *Value for Money*. Artinya dengan meningkatnya pengawasan, kinerja anggaran akan meningkat juga. Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto (2021) yang menemukan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan agar kinerja anggaran dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 5 yang menyatakan variabel pengawasan keuangan yang berpengaruh dominan terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diterima.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dimana dari hasil Uji T menunjukkan T Hitung variabel Pengawasan Keuangan sebesar $11,994 > T$ Tabel sebesar $1,986$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dimana dari hasil Uji T menunjukkan T Hitung variabel Akuntabilitas sebesar $3,959 > T$ Tabel sebesar $1,986$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.
3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dimana dari hasil Uji T menunjukkan T Hitung variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan sebesar $2,769 > T$ Tabel sebesar $1,986$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$.
4. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif

signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*, dimana dari hasil Uji F menunjukkan F Hitung sebesar $641,157 > F$ Tabel sebesar 2,71 dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa peningkatan Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan akan mempengaruhi peningkatan Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 95,5%.

5. Pengawasan Keuangan menjadi variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dibandingkan dengan variabel akuntabilitas dan variabel transparansi pengelolaan keuangan dimana dari hasil Uji Beta menunjukkan variabel Pengawasan Keuangan sebesar (0,650), variabel Akuntabilita sebesar (0,196,) dan variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan sebesar (0,164). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Pengawasan Keuangan akan semakin meningkatkan Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

6.2 Saran

1. Pengawasan, Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban yang dapat dibaca dan dipahami oleh semua masyarakat. Akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus dapat dipertahankan, namun transparansi terutama informasi hasil kinerja anggaran pemerintah perlu memperbaiki atau ditingkatkan publikasi laporan hasil anggarannya

melalui media massa dan lembar resmi pemerintah daerah secara jujur dan terbuka.

2. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan efektif, sebaiknya peralatan yang usang/rusak yang terdapat pada setiap perangkat daerah didata secepat mungkin. sehingga kegiatan pembuatan laporan keuangan tidak terganggu oleh peralatan yang rusak tersebut. Dengan demikian pelaporan keuangan dapat dihasilkan tepat waktu.
3. Kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengantarkan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat menjadi Pemerintah Daerah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2011. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan).
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agung Rai, I gusti. 2011. Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta: Grafindo.
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia.
- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta.
- Ebrahim Alnoor. 2010. *The Many Faces Of Non Profit Accountability*. Harvard Business School.
- Gujarati, D.N. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika (Alih Bahasa: Mangunsong, R.C). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama. Jakarta: Salemba empat.
- Halim, Abdul, Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2012. Teori Akuntansi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadarisman, M. 2012. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Press.

- Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPF. E.
- Mahsun, Mohamad. 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPF. E.-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Moehariono. 2012. "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Mohammad, Ph. D. 2011. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nurlaila. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia I. Ternate: LepKhair.
- Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pedansa, Abdul Hasid dkk. 2013. Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari.
- Santoso, Singgih. 2012. Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2009. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Bandung: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sonny Sumarsono. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukarna, Drs. 2011. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Tjandra riawan. 2013. Hukum Keuangan Negara. Jakarta : PT. Grasindo.
- Ulum, Ihyaul. 2010. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko, 2011. Analisis kebijakan publik (konsep dan aplikasi proses kebijakan publik, Malang : Bayumedia.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Victorinus Laoli. 2019. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias. Riset & Jurnal Akuntansi. Volume 3 Nomor 1 Februari 2019.
- M. Iqbal Ashari, M. Elfan Kaukab. 2020. Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntans. 2(5).
- Cindy Arifani, Agustinus Salle, Andika Rante. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 13, Nomor 1.
- Fera Tri Wulandari Hermanto, Andri Widiyanto, Aryanto (2021) meneiliti tentang Analisis Determinasi Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal. Riset & Jurnal Akuntansi. Volume 5, Nomor 2.
- Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, Husni Thamrin. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi. Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya. 4 (1).

- Fyneface N. Akani. 2017. Financial accountability and performance of local governments in rivers state, Nigeria., Senior Lecturer, Department of Accounting, University of Port Harcourt, Choba, Nigeria.
- Garini, Nadia. 2011. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung.
- Muhammad Firdiansyah Adiwirya., et.al. 2015. Akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah kota Denpasar., Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Nopriansyah putra., et. Al. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pengawasan sebagai Variable Moderating pada Provinsi Sumatera Utara., Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Political Philosophy. Sociology*, George Washington University Etzioni Amitai. 2010. *Is Transparency The Best disinfectant*. The Journal Of. Jakarta.
- Rahayu, Eti Dwi. 2008. Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pengawasan Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Universitas Negeri Malang.
- Syerly., et.al. 2018. Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri No. 060958 Belawan., Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Tari Mellisa Rafar., et.al. 2015. Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Aceh Utara)., Magister Akuntansi program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir, 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. Hal 21-23.
- Wiguna, Made BS., Yuniartha G., dan Darmawan N. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- Xaba, Mgadla. 2010. *Financial Accountability At School: Challenges And Implications*. *Journal Of Education*, No 50. 2010.

Zhi Li, Xiaoling Ouyang., et. Al. 2017. *Does government transparency contribute to improved eco-efficiency performance? An empirical study of 262 cities in China.*, Department of Economics, School of Economics, Faculty of Economics and Management, East China Normal University, Shanghai 200062, China.

Zubir Syahputra, Amri, Dan Saiful Bahri . 2012. Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja Dan Kompensasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh Provinsi Aceh. Skripsi. Universitas Syiah Kuala.

SURAT IZIN PENELITIAN



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
NOBEL INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

Rektorat :
Jl. Sultan Alauddin No. 212 Makassar 90222
Sulawesi Selatan - INDONESIA
Telp. +62 411 - 861281, 861287, 863123
email : mm@nobel.ac.id

Nomor : 012/PPS/ITB-NI/VIII/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Tesis

Makassar, 30 Agustus 2021

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sulawesi Barat
Di-
Mamuju

Shubungan dengan rencana penelitian untuk penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Muhammad Amin**
NIM : 2019MM12236
Program Studi : Magister Manajemen (S2)
Judul Tesis : Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Komisi Pembimbing : 1. Dr. Maryadi, S.E., M.M.
2. Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., CA.

Waktu Penelitian : Selama bulan Agustus - September 2021

Untuk keperluan tersebut di atas, Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi izin penelitian pada Mahasiswa Kami tersebut untuk mengadakan Penelitian di Instansi terkait.

Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Makassar
Direktur Program Pascasarjana



Dr. Maryadi, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia;
2. Ketua PRODI MM PPS- Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia;
3. Mahasiswa Ybs.;
4. Peninggal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptspsulawesibarat@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR :00219/76.RP.PTSP.B/IX/2021

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
2. Menimbang : Surat Dari Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Program Pascasarjana Nomor: 012/PPS/ITB-NI/VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

- a. Nama/Objek : MUHAMMAD AMIN
b. NIM : 2019MM12236
c. Alamat : BTN Graha Nusa 3 Blok. D/5 Mamuju
c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERBASIS VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
2. Lokasi Penelitian : Seluruh OPD Pemprov Sulbar
3. Waktu/Lama : 31 Agustus 2021 s/d 30 September 2021
3. Penelitian : 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian **tidak** Menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati **semua** peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju
Pada Tanggal 2 September 2021

a.n. **GUBERNUR SULAWESI BARAT**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT
Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu



SULAWESI BARAT

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 196404081986031023

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Barat;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
6. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar di Makassar;
7. Peringgal;

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

Mamuju, Agustus 2021

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bap/Ibu Responden
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **“Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amin

NPM : 2019MM12236

Program Studi : Magister Manajemen

Alamat : BTN Graha Nusa 3 Blok D5 Mamuju

Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) sekalian untuk menjadi Responden dan mengisi kuesioner ini sebagai data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Ats kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Peneliti,

Muhammad Amin
2019MM12236

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN, AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA
ANGGARAN BERBASIS *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Kuesioner ini digunakan sepenuhnya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan dan tidak ada unsur yang menyesatkan dalam penggunaannya. Isilah form yang disediakan dengan jujur.

Petunjuk

Terdapat lima (5) pilihan jawaban, yaitu:

1. = STS = Sangat Tidak Setuju
2. = TS = Tidak Setuju
3. = N = Netral
4. = S = Setuju
5. = SS = Sangat Setuju

Data Responden :

Nomor Responden :

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Usia : 21-30 tahun 31-40 tahun
 41-50 tahun >50 tahun

Pendidikan terakhir : SMA Diploma
 S1 S2 S3

KUESIONER PENGAWASAN KEUANGAN (X1)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
	Kontrol Internal					
1	Saya berperan penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan anggaran					
2	Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran					
3	Pengawasan anggaran dilakukan secara internal dan eksternal					
4	Pimpinan atau atasan secara langsung dan rutin menilai kinerja bawahan pengguna anggaran					
5	Pimpinan SKPD mengontrol dan memonitoring setiap penggunaan anggaran oleh PPK					
	Kontrol Eksternal					
6	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara aktif mengawasi mekanisme penggunaan anggaran					
7	Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap anggaran adalah secara preventif dan repressif					
8	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara aktif melakukan pengawasan anggaran dengan menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)					
9	Revisi anggaran dilakukan dengan alasan skala prioritas					

KUESIONER AKUNTABILITAS (X2)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
	Akuntabilitas Proses					
1	Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat					
2	Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat					
3	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran					
	Akuntabilitas Program					
4	Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu					
5	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran					
	Akuntabilitas Kebijakan					
6	Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus-menerus					
7	Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu					
8	Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya					
9	Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (<i>vertical</i>) dan kepada masyarakat luas (<i>horizontal</i>)					

KUESIONER TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN (X3)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
	Informative					
1	Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi					
2	Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan ransparansi anggaran					
3	Mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran					
	Keterbukaan					
4	Sulit untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran karena birokratis					
5	Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran					
6	Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu					
	Pengungkapan					
7	Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan/suara rakyat					
8	Pengumuman tentang anggaran bisa didapat setiap waktu					
9	Pengumuman kebijakan anggaran mudah didapatkan oleh publik					

KUESIONER KINERJA ANGGARAN BERBASIS *VALUE FOR MONEY*

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
	Alokasi Biaya					
1	Anggaran dikelola dengan memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep <i>Value for Money</i> yang berorientasi kepada kepentingan publik					
2	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif					
3	Anggaran dikelola secara efisien dengan penggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu					
4	Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan					
5	Anggaran dikelola secara adil (<i>equity</i>) dan merata (<i>equality</i>) dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas					
6	Anggaran dikelola secara merata (<i>equality</i>) dan penggunaan dana publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu					
	Kualitas Pelayanan					
7	Adanya peran pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah					
8	Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik					
9	Anggaran selalu digunakan secara efisien dan hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan					
10	Penerapan prinsip ekonomi, efisien, dan efektif dalam penggunaan anggaran					
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS

11	<i>Value for Money</i> merupakan jembatan untuk mengantar pemerintah mencapai <i>Good Governance</i> yaitu pemerintah yang akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, serta efektif					
----	--	--	--	--	--	--

Lampiran 3

TABULASI DATA
Daftar Responden

No.	Jenis Kelamin	Usia	Masa Kerja	Pendidikan
1	P	44 Tahun	23 Tahun	S2
2	P	41 Tahun	33 Tahun	D3
3	L	36 Tahun	15 Tahun	S2
4	L	58 Tahun	34 Tahun	S2
5	L	58 Tahun	29 Tahun	S2
6	P	44 Tahun	11 Tahun	S2
7	P	47 Tahun	21 Tahun	S2
8	P	40 Tahun	11 Tahun	S1
9	P	48 Tahun	28 Tahun	S1
10	L	52 Tahun	31 Tahun	S1
11	L	38 Tahun	12 Tahun	S1
12	P	53 Tahun	30 Tahun	S1
13	P	48 Tahun	22 Tahun	S2
14	L	42 Tahun	12 Tahun	S2
15	L	46 Tahun	19 Tahun	S2
16	L	49 Tahun	10 Tahun	S2
17	P	50 Tahun	30 Tahun	S2
18	L	50 Tahun	27 Tahun	S2
19	P	38 Tahun	12 Tahun	S2
20	P	53 Tahun	32 Tahun	S1
21	L	36 Tahun	12 Tahun	S1
22	L	54 Tahun	23 Tahun	S2
23	L	48 Tahun	11 Tahun	S1
24	P	41 Tahun	14 Tahun	S1
25	L	46 Tahun	28 Tahun	S2
26	P	45 Tahun	19 Tahun	S2
27	L	45 Tahun	15 Tahun	S2
28	L	38 Tahun	11 Tahun	S1
29	P	40 Tahun	14 Tahun	S1
30	L	52 Tahun	22 Tahun	S1
31	P	42 Tahun	33 Tahun	S2
32	P	52 Tahun	27 Tahun	S2
33	L	52 Tahun	27 Tahun	S3
34	L	40 Tahun	11 Tahun	S1
35	P	44 Tahun	13 Tahun	S1
36	P	53 Tahun	19 Tahun	S2
37	L	46 Tahun	13 Tahun	S1
38	P	51 Tahun	20 Tahun	S1
39	L	58 Tahun	29 Tahun	S2
40	P	45 Tahun	11 Tahun	S1

No.	Jenis Kelamin	Usia	Masa Kerja	Pendidikan
41	L	52 Tahun	28 Tahun	S2
42	P	39 Tahun	11 Tahun	S2
43	L	39 Tahun	14 Tahun	S2
44	L	40 Tahun	15 Tahun	S2
45	L	42 Tahun	10 Tahun	S2
46	L	51 Tahun	22 Tahun	S2
47	P	39 Tahun	11 Tahun	S2
48	P	52 Tahun	18 Tahun	S1
49	L	47 Tahun	19 Tahun	S2
50	L	28 Tahun	11 Tahun	S1
51	P	44 Tahun	12 Tahun	S1
52	P	54 Tahun	23 Tahun	S2
53	P	43 Tahun	13 Tahun	S2
54	L	46 Tahun	29 Tahun	S2
55	L	42 Tahun	16 Tahun	S2
56	L	47 Tahun	28 Tahun	S1
57	L	41 Tahun	12 Tahun	S1
58	P	41 Tahun	11 Tahun	S1
59	L	52 Tahun	30 Tahun	S2
60	L	35 Tahun	11 Tahun	S1
61	L	41 Tahun	15 Tahun	S2
62	L	38 Tahun	11 Tahun	S1
63	P	53 Tahun	20 Tahun	S1
64	L	53 Tahun	33 Tahun	S2
65	L	42 Tahun	15 Tahun	S1
66	L	40 Tahun	6 Tahun	S2
67	L	50 Tahun	30 Tahun	S2
68	L	46 Tahun	11 Tahun	S2
69	L	42 Tahun	11 Tahun	S1
70	L	38 Tahun	19 Tahun	S2
71	P	44 Tahun	15 Tahun	S2
72	L	57 Tahun	30 Tahun	S2
73	L	44 Tahun	25 Tahun	S2
74	L	28 Tahun	6 Tahun	S1
75	L	44 Tahun	13 Tahun	S1
76	P	56 Tahun	21 Tahun	S2
77	P	39 Tahun	12 Tahun	S2
78	L	34 Tahun	11 Tahun	S2
79	L	56 Tahun	29 Tahun	S1
80	L	47 Tahun	15 Tahun	S1
81	P	38 Tahun	13 Tahun	S1
82	L	54 Tahun	28 Tahun	S1
83	P	38 Tahun	15 Tahun	S1

No.	Jenis Kelamin	Usia	Masa Kerja	Pendidikan
84	L	37 Tahun	16 Tahun	S1
85	L	50 Tahun	24 Tahun	S2
86	L	39 Tahun	11 Tahun	S1
87	L	52 Tahun	26 Tahun	S2
88	L	36 Tahun	10 Tahun	S1
89	P	35 Tahun	16 Tahun	S1
90	L	57 Tahun	22 Tahun	S2
91	L	43 Tahun	11 Tahun	S1
92	P	45 Tahun	13 Tahun	S1
93	P	52 Tahun	18 Tahun	S1
94	P	47 Tahun	7 Tahun	S1

Jawaban Responden terhadap Pengawasan Keuangan

No	Pengawasan Keuangan (X1)									Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
2	4	5	4	3	4	3	4	4	5	36
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	37
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	3	2	3	3	4	3	3	2	2	25
7	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
8	3	2	3	3	4	3	3	2	2	25
9	3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
10	4	4	4	3	4	5	4	4	5	37
11	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
12	5	4	4	4	4	4	5	5	4	39
13	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
14	4	5	3	4	5	5	5	5	4	40
15	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37
16	4	4	5	4	4	5	5	5	5	41
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
19	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
20	4	5	4	4	4	5	5	5	5	41
21	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
22	4	5	4	4	4	5	5	4	5	40
23	4	3	3	4	4	3	3	3	3	30
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	3	3	4	34
26	4	5	4	4	4	5	5	4	5	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	4	5	4	5	4	4	5	4	5	40
29	5	5	3	4	4	5	4	4	4	38

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	Total X2
22	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
23	4	4	4	3	4	3	3	3	3	31
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
26	3	3	4	4	4	3	3	3	3	30
27	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	5	4	4	4	4	3	5	5	4	38
30	3	3	3	3	2	2	3	3	4	26
31	4	4	4	3	3	3	4	4	4	33
32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
34	4	4	5	4	4	4	5	4	5	39
35	3	2	3	3	2	3	3	3	3	25
36	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
37	4	4	4	3	3	3	4	4	4	33
38	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
40	3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
43	5	5	4	4	5	4	4	4	5	40
44	4	4	4	3	4	3	3	3	3	31
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
47	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
48	5	5	5	5	5	4	5	4	4	42
49	4	5	4	4	5	5	4	4	5	40
50	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
51	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
52	4	4	4	3	3	3	4	4	4	33
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
54	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
55	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
56	4	4	5	5	5	4	5	5	5	42
57	3	2	3	3	2	3	3	3	3	25
58	3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
59	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
60	2	2	3	2	3	2	2	3	3	22
61	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
62	4	4	4	3	4	3	4	4	4	34
63	5	4	4	4	4	4	5	4	4	38
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
65	3	3	3	3	2	3	2	3	3	25
66	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
67	3	3	3	3	2	2	3	3	3	25

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	Total X2
68	3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
69	4	4	4	5	4	4	5	5	4	39
70	3	2	3	3	2	3	3	3	3	25
71	3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
72	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
73	2	2	3	2	3	2	2	3	3	22
74	3	3	3	3	2	2	3	3	4	26
75	4	4	4	3	3	3	4	4	4	33
76	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
78	4	4	5	4	4	4	5	4	5	39
79	3	2	3	3	2	3	3	3	3	25
80	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
81	4	4	4	3	3	3	4	4	4	33
82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
84	4	4	5	4	4	4	5	4	5	39
85	3	2	3	3	2	3	3	3	3	25
86	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
87	4	4	4	3	3	3	4	4	4	33
88	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
90	3	2	3	3	2	3	3	3	3	25
91	3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
92	3	3	3	3	2	3	3	3	3	26
93	2	2	3	2	3	2	2	3	3	22
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27

Jawaban Responden terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan

No	Transparansi Pengelolaan Keuangan (X3)									Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	
1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	15
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
6	3	3	2	3	3	3	3	2	3	25
7	4	4	4	4	3	3	4	4	4	34
8	3	3	3	3	2	3	3	2	3	25
9	3	3	2	3	3	3	3	3	3	26
10	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
11	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
13	5	4	4	4	4	4	5	5	4	39

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	Total X3
14	5	4	4	5	5	4	5	4	5	41
15	5	5	4	4	4	4	4	5	4	39
16	4	4	5	5	4	5	5	5	5	42
17	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
18	4	4	4	3	3	3	4	4	3	32
19	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
20	4	4	5	4	5	5	4	5	4	40
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
23	4	4	4	3	4	3	3	3	3	31
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
26	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29
27	5	4	5	5	4	4	5	4	5	41
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	5	4	4	4	4	3	5	5	4	38
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
31	4	4	4	3	3	3	4	4	3	32
32	3	2	2	2	3	2	3	2	2	21
33	3	2	3	3	3	3	2	4	3	26
34	4	4	5	4	4	4	2	4	4	35
35	3	3	2	3	3	3	3	3	3	26
36	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
37	4	4	4	3	3	3	2	4	3	30
38	4	4	4	4	5	4	2	4	4	35
39	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
40	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
42	4	4	4	4	4	4	2	4	4	34
43	5	5	4	4	5	4	2	4	4	37
44	4	4	4	3	4	3	2	3	3	30
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
46	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
47	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
48	5	5	5	5	5	4	2	4	5	40
49	4	5	4	4	5	5	4	4	4	39
50	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
51	4	4	4	3	4	4	2	4	3	32
52	4	4	4	3	3	3	2	4	3	30
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
54	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34
55	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
56	4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
57	3	3	2	3	3	3	2	2	3	24
58	3	3	2	3	3	3	3	3	3	26
59	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Total Y
5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
6	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	31
7	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42
8	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	31
9	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
10	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	46
11	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43
12	4	5	5	3	4	4	5	4	4	5	4	47
13	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	47
14	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	47
15	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	47
16	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	50
17	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	30
18	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	40
19	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43
20	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	46
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
22	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	46
23	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	38
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
25	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43
26	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	46
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
28	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	47
29	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	47
30	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	30
31	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42
32	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	27
33	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34
34	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	46
35	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
36	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	47
37	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
39	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	35
40	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
42	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	46
43	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	49
44	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	38
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
46	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43
47	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	47
48	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	48
49	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	49

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Total Y
50	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	47
51	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	41
52	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	41
53	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	53
54	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43
55	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43
56	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	47
57	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	29
58	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
59	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	30
60	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	28
61	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	47
62	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	41
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
64	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
65	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	31
66	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42
67	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	31
68	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
69	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	46
70	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	29
71	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
72	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	30
73	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	28
74	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	30
75	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42
76	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	27
77	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34
78	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	46
79	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
80	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	47
81	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42
82	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	27
83	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34
84	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	46
85	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
86	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	47
87	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
89	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	35
90	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	29
91	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
92	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	30
93	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	28
94	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34

OUTPUT SPSS VERSI 25

1 UJI STATISTIK DESKRIFTIF

A. DESKRIFTIF RESPONDEN

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	57	60.6	60.6	60.6
	Perempuan	37	39.4	39.4	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Distribusi Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	28.00	2	2.1	2.1	2.1
	34.00	1	1.1	1.1	3.2
	35.00	2	2.1	2.1	5.3
	36.00	3	3.2	3.2	8.5
	37.00	1	1.1	1.1	9.6
	38.00	7	7.4	7.4	17.0
	39.00	5	5.3	5.3	22.3
	40.00	5	5.3	5.3	27.7
	41.00	5	5.3	5.3	33.0
	42.00	6	6.4	6.4	39.4
	43.00	2	2.1	2.1	41.5
	44.00	7	7.4	7.4	48.9

45.00	4	4.3	4.3	53.2
46.00	5	5.3	5.3	58.5
47.00	5	5.3	5.3	63.8
48.00	3	3.2	3.2	67.0
49.00	1	1.1	1.1	68.1
50.00	4	4.3	4.3	72.3
51.00	2	2.1	2.1	74.5
52.00	9	9.6	9.6	84.0
53.00	5	5.3	5.3	89.4
54.00	3	3.2	3.2	92.6
56.00	2	2.1	2.1	94.7
57.00	2	2.1	2.1	96.8
58.00	3	3.2	3.2	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6.00	2	2.1	2.1	2.1
	7.00	1	1.1	1.1	3.2
	10.00	3	3.2	3.2	6.4
	11.00	17	18.1	18.1	24.5
	12.00	7	7.4	7.4	31.9
	13.00	6	6.4	6.4	38.3
	14.00	3	3.2	3.2	41.5

15.00	8	8.5	8.5	50.0
16.00	3	3.2	3.2	53.2
18.00	2	2.1	2.1	55.3
19.00	5	5.3	5.3	60.6
20.00	2	2.1	2.1	62.8
21.00	2	2.1	2.1	64.9
22.00	4	4.3	4.3	69.1
23.00	3	3.2	3.2	72.3
24.00	1	1.1	1.1	73.4
25.00	1	1.1	1.1	74.5
26.00	1	1.1	1.1	75.5
27.00	3	3.2	3.2	78.7
28.00	5	5.3	5.3	84.0
29.00	4	4.3	4.3	88.3
30.00	5	5.3	5.3	93.6
31.00	1	1.1	1.1	94.7
32.00	1	1.1	1.1	95.7
33.00	3	3.2	3.2	98.9
34.00	1	1.1	1.1	100.0
Total	94	100.0	100.0	

B. DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN

X1_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	9	9.6	9.6	9.6
	3.00	34	36.2	36.2	45.7
	4.00	46	48.9	48.9	94.7
	5.00	5	5.3	5.3	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X1_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	8.5	8.5	8.5
	3.00	36	38.3	38.3	46.8
	4.00	30	31.9	31.9	78.7
	5.00	20	21.3	21.3	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X1_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	44	46.8	46.8	46.8
	4.00	46	48.9	48.9	95.7
	5.00	4	4.3	4.3	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X1_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	6.4	6.4	6.4
	3.00	28	29.8	29.8	36.2
	4.00	57	60.6	60.6	96.8
	5.00	3	3.2	3.2	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X1_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	6.4	6.4	6.4
	3.00	26	27.7	27.7	34.0
	4.00	59	62.8	62.8	96.8
	5.00	3	3.2	3.2	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X1_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	10	10.6	10.6	10.6
	3.00	35	37.2	37.2	47.9
	4.00	29	30.9	30.9	78.7
	5.00	20	21.3	21.3	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X1_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.2	3.2	3.2
	3.00	36	38.3	38.3	41.5
	4.00	36	38.3	38.3	79.8
	5.00	19	20.2	20.2	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X1_8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	11	11.7	11.7	11.7
	3.00	28	29.8	29.8	41.5
	4.00	48	51.1	51.1	92.6
	5.00	7	7.4	7.4	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X1_9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	5.3	5.3	5.3
	3.00	32	34.0	34.0	39.4
	4.00	39	41.5	41.5	80.9
	5.00	18	19.1	19.1	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Item Akuntabilitas (X2)**X2_1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.1	1.1	1.1
	2.00	6	6.4	6.4	7.4
	3.00	33	35.1	35.1	42.6
	4.00	45	47.9	47.9	90.4
	5.00	9	9.6	9.6	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X2_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	20	21.3	21.3	21.3
	3.00	19	20.2	20.2	41.5
	4.00	49	52.1	52.1	93.6
	5.00	6	6.4	6.4	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X2_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.2	3.2	3.2
	3.00	35	37.2	37.2	40.4
	4.00	50	53.2	53.2	93.6
	5.00	6	6.4	6.4	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X2_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	7.4	7.4	7.4
	3.00	44	46.8	46.8	54.3
	4.00	37	39.4	39.4	93.6
	5.00	6	6.4	6.4	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X2_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	21	22.3	22.3	22.3
	3.00	29	30.9	30.9	53.2
	4.00	36	38.3	38.3	91.5
	5.00	8	8.5	8.5	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X2_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	11	11.7	11.7	11.7
	3.00	40	42.6	42.6	54.3
	4.00	39	41.5	41.5	95.7
	5.00	4	4.3	4.3	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X2_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	10	10.6	10.6	10.6
	3.00	31	33.0	33.0	43.6
	4.00	35	37.2	37.2	80.9
	5.00	18	19.1	19.1	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X2_8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.1	1.1	1.1
	2.00	3	3.2	3.2	4.3
	3.00	38	40.4	40.4	44.7
	4.00	38	40.4	40.4	85.1
	5.00	14	14.9	14.9	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X2_9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	4.3	4.3	4.3
	3.00	36	38.3	38.3	42.6
	4.00	41	43.6	43.6	86.2
	5.00	13	13.8	13.8	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Item Transparansi Pengelolaan Keuangan (X3)

X3_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.1	1.1	1.1
	3.00	36	38.3	38.3	39.4
	4.00	49	52.1	52.1	91.5
	5.00	8	8.5	8.5	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X3_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	11	11.7	11.7	11.7
	3.00	27	28.7	28.7	40.4
	4.00	48	51.1	51.1	91.5
	5.00	8	8.5	8.5	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X3_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	20	21.3	21.3	21.3
	3.00	18	19.1	19.1	40.4
	4.00	45	47.9	47.9	88.3
	5.00	11	11.7	11.7	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X3_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	7.4	7.4	7.4
	3.00	42	44.7	44.7	52.1
	4.00	39	41.5	41.5	93.6
	5.00	6	6.4	6.4	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X3_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.1	1.1	1.1
	2.00	5	5.3	5.3	6.4
	3.00	43	45.7	45.7	52.1
	4.00	36	38.3	38.3	90.4
	5.00	9	9.6	9.6	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X3_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	7.4	7.4	7.4
	3.00	43	45.7	45.7	53.2
	4.00	36	38.3	38.3	91.5
	5.00	8	8.5	8.5	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X3_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	26	27.7	27.7	27.7
	3.00	28	29.8	29.8	57.4
	4.00	33	35.1	35.1	92.6
	5.00	7	7.4	7.4	100.0
Total		94	100.0	100.0	

X3_8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.1	1.1	1.1
	2.00	11	11.7	11.7	12.8
	3.00	26	27.7	27.7	40.4
	4.00	42	44.7	44.7	85.1
	5.00	14	14.9	14.9	100.0
	Total		94	100.0	100.0

X3_9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	7.4	7.4	7.4
	3.00	42	44.7	44.7	52.1
	4.00	39	41.5	41.5	93.6
	5.00	6	6.4	6.4	100.0
	Total		94	100.0	100.0

Item Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* (Y)**Y_1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.2	3.2	3.2
	3.00	33	35.1	35.1	38.3
	4.00	52	55.3	55.3	93.6
	5.00	6	6.4	6.4	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Y_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	34	36.2	36.2	36.2
	4.00	56	59.6	59.6	95.7
	5.00	4	4.3	4.3	100.0
	Total		94	100.0	100.0

Y_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	16	17.0	17.0	17.0
	3.00	24	25.5	25.5	42.6
	4.00	41	43.6	43.6	86.2
	5.00	13	13.8	13.8	100.0
	Total		94	100.0	100.0

Y_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	6.4	6.4	6.4
	3.00	47	50.0	50.0	56.4
	4.00	34	36.2	36.2	92.6
	5.00	7	7.4	7.4	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Y_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	6.4	6.4	6.4
	3.00	37	39.4	39.4	45.7
	4.00	44	46.8	46.8	92.6
	5.00	7	7.4	7.4	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Y_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	3.2	3.2	3.2
	3.00	34	36.2	36.2	39.4
	4.00	50	53.2	53.2	92.6
	5.00	7	7.4	7.4	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Y_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	9	9.6	9.6	9.6
	3.00	26	27.7	27.7	37.2
	4.00	43	45.7	45.7	83.0
	5.00	16	17.0	17.0	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Y_8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	16	17.0	17.0	17.0
	3.00	30	31.9	31.9	48.9
	4.00	31	33.0	33.0	81.9
	5.00	17	18.1	18.1	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Y_9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	10	10.6	10.6	10.6
	3.00	26	27.7	27.7	38.3
	4.00	52	55.3	55.3	93.6
	5.00	6	6.4	6.4	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Y_10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	34	36.2	36.2	36.2
	4.00	58	61.7	61.7	97.9
	5.00	2	2.1	2.1	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Y_11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	12	12.8	12.8	12.8
	3.00	28	29.8	29.8	42.6
	4.00	49	52.1	52.1	94.7
	5.00	5	5.3	5.3	100.0
Total		94	100.0	100.0	

2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i>	39.4787	7.22262	94
Pengawasan Keuangan	32.6383	6.00511	94
Akuntabilitas	31.7766	6.51079	94
Transparansi Pengelolaan Keuangan	31.4787	6.21605	94

3 UJI INSTRUMEN PENELITIAN

A. Uji Validitas

□ UJI VALIDITAS ITEM ($r > 0.2028$) A. Validitas Pengawasan Keuangan (X1)

		Correlations									
		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	X1_7	X1_8	X1_9	X1
X1_1	Pearson Correlation	1	.714**	.601**	.778**	.827**	.746**	.756**	.715**	.680**	.873**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1_2	Pearson Correlation	.714**	1	.581**	.598**	.560**	.693**	.773**	.745**	.796**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1_3	Pearson Correlation	.601**	.581**	1	.629**	.628**	.657**	.716**	.739**	.782**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1_4	Pearson Correlation	.778**	.598**	.629**	1	.727**	.681**	.742**	.655**	.641**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1_5	Pearson Correlation	.827**	.560**	.628**	.727**	1	.751**	.756**	.698**	.595**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1_6	Pearson Correlation	.746**	.693**	.657**	.681**	.751**	1	.782**	.731**	.802**	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1_7	Pearson Correlation	.756**	.773**	.716**	.742**	.756**	.782**	1	.803**	.817**	.921**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1_8	Pearson Correlation	.715**	.745**	.739**	.655**	.698**	.731**	.803**	1	.829**	.891**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1_9	Pearson Correlation	.680**	.796**	.782**	.641**	.595**	.802**	.817**	.829**	1	.900**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X1	Pearson Correlation	.873**	.844**	.802**	.819**	.831**	.888**	.921**	.891**	.900**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Validitas Akuntabilitas (X2)

Correlations

		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2_6	X2_7	X2_8	X2_9	X2
X2_1	Pearson Correlation	1	.843**	.814**	.788**	.733**	.775**	.864**	.820**	.742**	.912**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2_2	Pearson Correlation	.843**	1	.844**	.735**	.760**	.723**	.779**	.771**	.803**	.899**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2_3	Pearson Correlation	.814**	.844**	1	.781**	.794**	.753**	.858**	.781**	.843**	.920**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2_4	Pearson Correlation	.788**	.735**	.781**	1	.757**	.807**	.838**	.777**	.729**	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2_5	Pearson Correlation	.733**	.760**	.794**	.757**	1	.735**	.741**	.717**	.719**	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2_6	Pearson Correlation	.775**	.723**	.753**	.807**	.735**	1	.765**	.771**	.708**	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2_7	Pearson Correlation	.864**	.779**	.858**	.838**	.741**	.765**	1	.876**	.862**	.937**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2_8	Pearson Correlation	.820**	.771**	.781**	.777**	.717**	.771**	.876**	1	.864**	.912**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2_9	Pearson Correlation	.742**	.803**	.843**	.729**	.719**	.708**	.862**	.864**	1	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X2	Pearson Correlation	.912**	.899**	.920**	.888**	.863**	.866**	.937**	.912**	.898**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Validitas Transparansi pengelolaan keuangan (X3)

Correlations

		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	X3_6	X3_7	X3_8	X3_9	X3
X3_1	Pearson Correlation	1	.831**	.802**	.772**	.776**	.666**	.471**	.756**	.772**	.885**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X3_2	Pearson Correlation	.831**	1	.823**	.804**	.751**	.746**	.411**	.648**	.804**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X3_3	Pearson Correlation	.802**	.823**	1	.800**	.720**	.747**	.375**	.763**	.800**	.889**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X3_4	Pearson Correlation	.772**	.804**	.800**	1	.807**	.855**	.520**	.712**	1.000**	.937**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X3_5	Pearson Correlation	.776**	.751**	.720**	.807**	1	.803**	.356**	.663**	.807**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X3_6	Pearson Correlation	.666**	.746**	.747**	.855**	.803**	1	.451**	.706**	.855**	.882**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X3_7	Pearson Correlation	.471**	.411**	.375**	.520**	.356**	.451**	1	.464**	.520**	.605**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X3_8	Pearson Correlation	.756**	.648**	.763**	.712**	.663**	.706**	.464**	1	.712**	.840**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X3_9	Pearson Correlation	.772**	.804**	.800**	1.000**	.807**	.855**	.520**	.712**	1	.937**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
X3	Pearson Correlation	.885**	.880**	.889**	.937**	.859**	.882**	.605**	.840**	.937**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Validitas Kinerja (Y)

Correlations

		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	Y_8	Y_9	Y_10	Y_11	Y
Y_1	Pearson Correlation	1	.791**	.740**	.630**	.710**	.976**	.767**	.728**	.772**	.819**	.767**	.887**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y_2	Pearson Correlation	.791**	1	.817**	.626**	.711**	.771**	.698**	.707**	.815**	.965**	.792**	.882**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y_3	Pearson Correlation	.740**	.817**	1	.762**	.803**	.739**	.760**	.673**	.833**	.827**	.929**	.916**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y_4	Pearson Correlation	.630**	.626**	.762**	1	.747**	.659**	.726**	.770**	.593**	.606**	.714**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y_5	Pearson Correlation	.710**	.711**	.803**	.747**	1	.736**	.862**	.767**	.675**	.731**	.827**	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y_6	Pearson Correlation	.976**	.771**	.739**	.659**	.736**	1	.785**	.726**	.754**	.799**	.748**	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y_7	Pearson Correlation	.767**	.698**	.760**	.726**	.862**	.785**	1	.806**	.680**	.729**	.790**	.893**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y_8	Pearson Correlation	.728**	.707**	.673**	.770**	.767**	.726**	.806**	1	.682**	.732**	.662**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y_9	Pearson Correlation	.772**	.815**	.833**	.593**	.675**	.754**	.680**	.682**	1	.845**	.818**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y_10	Pearson Correlation	.819**	.965**	.827**	.606**	.731**	.799**	.729**	.732**	.845**	1	.816**	.901**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y_11	Pearson Correlation	.767**	.792**	.929**	.714**	.827**	.748**	.790**	.662**	.818**	.816**	1	.914**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Y	Pearson Correlation	.887**	.882**	.916**	.816**	.888**	.887**	.893**	.858**	.868**	.901**	.914**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B. UJI RELIABILITAS

1. RELIABILITAS PENGAWASAN KEUANGAN (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	94	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	94	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.955	9

→ Nilai Cronbach's Alpha
 $0.955 > 0.50$

2. RELIABILITAS AKUNTABILITAS (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	94	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	94	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.969	9

→ Nilai Cronbach's Alpha
 $0.969 > 0.50$

3. RELIABILITAS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	94	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	94	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.950	9



Nilai Cronbach's Alpha
 $0.950 > 0.50$

4. RELIABILITAS KINERJA (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	94	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	94	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

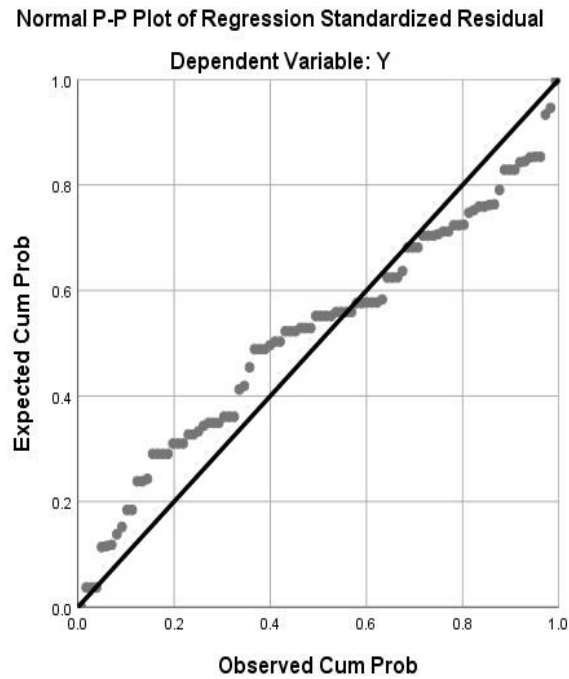
Cronbach's Alpha	N of Items
.967	11



Nilai Cronbach's Alpha
 $0.967 > 0.50$

4. UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS



2. UJI MULTIKOLINERITAS → NILAI VIF < 10.00

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Zero-order	Correlations		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta				Partial	Part	Tolerance	VIF	
1.	(Constant)	1.049	.893		1.175	.243					
	X1	.782	.065	.650	11.994	.000	.966	.784	.267	.169	5.915
	X2	.217	.055	.196	3.959	.000	.897	.385	.086	.203	4.920
	X3	.191	.069	.164	2.769	.007	.924	.280	.062	.141	7.096

a. Dependent Variable: Y

3. UJI AUTOKORELASI

- Jumlah $n = 94$
- jumlah k (independen variabel) = 3
- Nilai $dL = 1.599$
- Nilai $dU = 1.730$
- Nilai $Dw = 1.845$
- Kesimpulan = $Dw > dU$ ($1.845 > 1.730$) = Tidak Terdapat autokorelasi

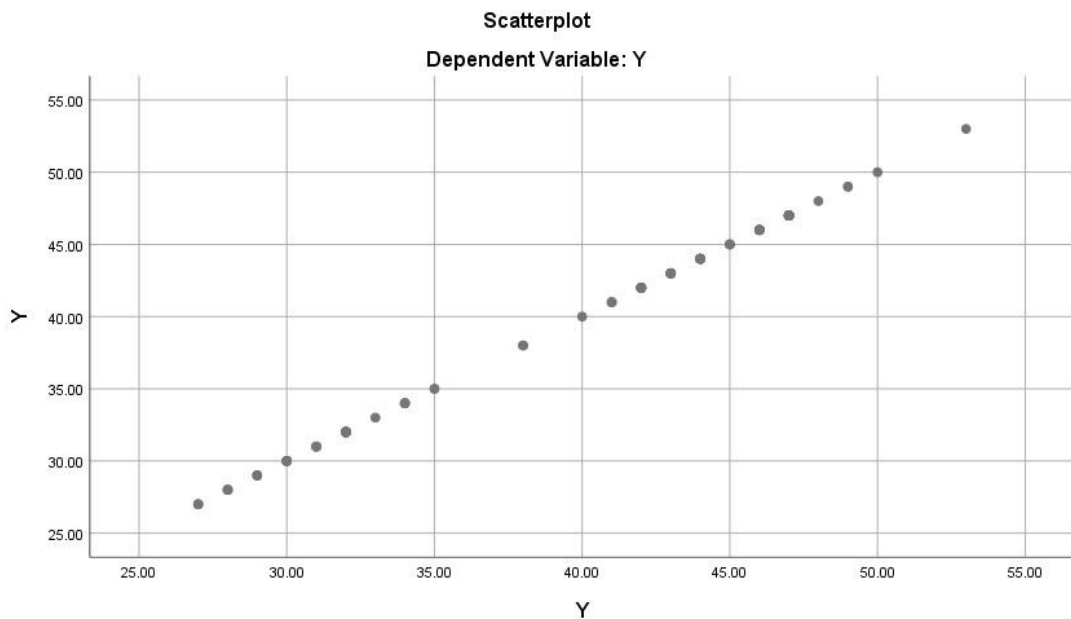
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.977 ^a	.955	.954	1.55226	.955	641.157	3	90	.000	1.845

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

4. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas



5. UJI HIPOTESIS

A. UJI T

T Tabel = 1.986

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Zero-order	Correlations		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Partial	Part	Tolerance	VIF
1.	(Constant)	1.049	.893		1.175	.243					
	X1	.782	.065	.650	11.994	.000	.966	.784	.267	.189	5.915
	X2	.217	.055	.196	3.959	.000	.897	.385	.088	.203	4.920
	X3	.191	.069	.164	2.769	.007	.924	.280	.062	.141	7.096

a. Dependent Variable: Y

B. UJI F

UJI F → F TABEL = 2.71

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4634.603	3	1544.868	641.157	.000 ^b
	Residual	216.855	90	2.409		
	Total	4851.457	93			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

C. UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

UJI KOEFISIEN REGRESI

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1.	X3, X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1.	.877 ^a	.955	.954	1.56226	.955	641.157	3	90	.000	1.845

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Amin

Tempat / Tanggal Lahir : Tappagalung / 17 Agustus 1982

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam

Telepon / HP : 085242664215

Email : muhammad82.ma@gmail.com

Satus Dalam Keluarga : Anak ke 7 dari 7 bersaudara

Alamat Rumah : a. Jalan : BTN Graha Nusa 3 Blok D5
b. Kelurahan / Desa : Simboro
c. Kecamatan : Simboro
d. Kabupaten / Kota : Mamuju
e. Provinsi : Sulawesi Barat

Kegemaran (Hobby) : Traveling, Wisata Kuliner, Renang

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Riwayat Pekerjaan : a. PT. Seruni Sahabat Serumpung dari Tahun 2005 s/d 2007
b. PT. Makro Indonesia dari Tahun 2007 s/d 2009.
b. PT. Lotte Shopping Indonesia dari Tahun 2009 s/d 2011
c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Sulbar dari Tahun 2011 sampai sekarang

Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri Nomor 5 Tappagalung Tahun 1994
b. SLTP Negeri 1 Sendana Tahun 1997
c. SMU Negeri 1 Majene Tahun 2000
d. Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2004
e. Universitas Terbuka Majene Tahun 2017.

Makassar, November 2021

Yang membuat,

Muhammad Amin
2019MM12236